

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN UKM SEBELUM DAN  
SESUDAH PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL  
(Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Tri Widodo**

**No. Mahasiswa : 99311061**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA**

**2003**

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN UKM SEBELUM DAN  
SESUDAH PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL  
(Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
Guna memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Manajemen Keuangan  
Pada Fakultas Ekonomi UII**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Tri Widodo**

**No. Mahasiswa : 99311061**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA**

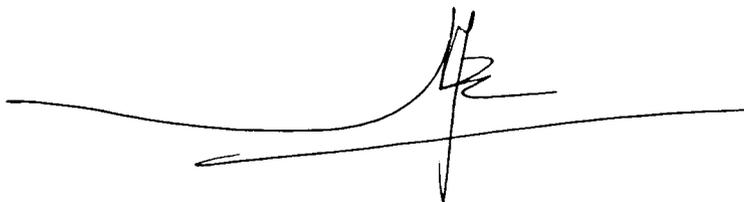
**2003**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN UKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)

Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing :

Yogyakarta, Februari 2003

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'F' followed by a horizontal line, positioned above a solid horizontal line.

Dra. Nur Fauziah, MM

(Dosen Pembimbing)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL:

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN UKM SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL (STUDI KASUS PADA PT. BANK  
RAKYAT INDONESIA CABANG CIK DITIRO YOGYAKARTA)

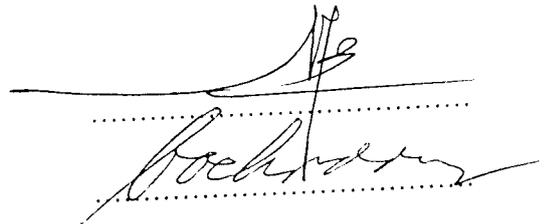
Disusun Oleh: TRI WIDODO  
Nomor Mahasiswa: 99311061

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS  
pada tanggal 13 Maret 2003

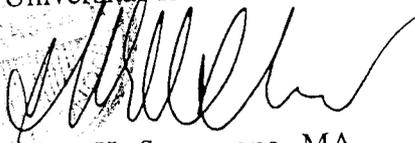
Penguji/Pembimbing Skripsi: DRA. NURFAUZIAH, MM

Penguji

DRS. H. BACHRUDDIN, M.SI



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. H. Suwarsono, MA

## MOTTO

- ☺ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*

(QS. Asy Syarh: 6-8)

- ☺ *"...Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.*

(QS. Az-Zumar: 9)

- ☺ *"ALLAH akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat."*

(QS. Al-Mujaadilah: 11)

- ☺ *Jika engkau mencari dunia maka pelajarilah ilmu,  
Jika engkau mencari akherat maka pelajarilah ilmu,  
Jika engkau mencari kedua-duanya maka pelajarilah ilmu.*

(HR. Bukhori Muslim)

- ☺ *Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah  
Dengan seni, kehidupan menjadi indah  
Dengan agama, kehidupan menjadi terarah dan bermakna*

(H.A. Mukti Ali)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakanku agar selalu dalam lindungan ALLAH SWT dan selalu memberikan dukungan agar mencapai sukses*

- ♥ *Papa, Mama, Eyang tercinta atas segala doa, bimbingan, kasih sayang yang telah diberikan dari kecil sampai sekarang*
- ♥ *Mas Budi, Mbak Dian, De' Kiki, dan De' Koko yang telah memberikan berbagai suasana kehidupan selama ini baik kebahagiaan maupun kesedihan*
- ♥ *.....*

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dari hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi berjudul “Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan UKM Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)” merupakan hasil analisis terhadap laporan keuangan dari UKM dengan periode sebelum dan sesudah UKM menerima kredit komersial dari bank khususnya UKM yang mendapatkan kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Penulis ingin mengetahui apakah terjadi perbedaan tingkat kesehatan UKM sesudah menerima kredit tersebut.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang ikut serta membantu kelancaran proses penyusunan skripsi tersebut dari awal sampai akhir. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. Suwarsono Muhammad, MA.
2. Ibu Dra. Nur Fauziah, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi saran, petunjuk serta pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Muntaha dan Ibu Dra. Trias Setiawati, M.Si., yang bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama penelitian berlangsung.
4. Ibu Retno Mursudarini selaku pimpinan PT. BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

5. Bapak Sentot, Bapak Riswono, Ibu Endang, Ibu Nanuk dan segenap karyawan PT. BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta atas bantuan dan dukungan selama penelitian berlangsung.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Mikro Yogyakarta serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta yang telah memberikan beberapa informasi tambahan yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhirnya besar harapan penulis dan keyakinan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yogyakarta, Februari 2003

Penulis

**Tri Widodo**

99311061

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat setia: Aig, Ali, Anjar, Desi, Fitria, Galuh, Gunawan, Lia, Lina, Maria, Meli, Mindra, Rio, Tatas, dan Tedy atas doa, dorongan, perhatian dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selama-lamanya.

Kepada teman-teman “Malam yang Penuh Keindahan” Atad, Bagus, Deni, Ervin, Heri, Ita, Juli, Ketut, Mursid, Prima, Rohan, Sinatria, Tisna dan Yanuar, yang telah memberikan suasana “*refresh*” selama penyusunan skripsi ini dengan mengadakan berbagai kegiatan yang menyenangkan.

Kepada teman-teman Manajemen Kelas A Angkatan '99 yang telah menemani penulis selama proses kuliah dari semester I sampai sekarang dengan berbagai kegiatan yang menarik.

Kepada adik-adik Manajemen Angkatan '00 Ajeng, Erfa, Fitri, Ira, Marina, Lina, Tutik, Unggul, dan Wenny terima kasih atas bantuan dan dukungan selama ini.

Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan saudara-saudaraku semua. Amien.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Hipotesis Penelitian.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Bank .....	17
B. Laporan Keuangan .....	27
C. Analisis Rasio.....	30

### BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA

CABANG CIK DI TIRO YOGYAKARTA .....	39
A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI).....	39
B. Lokasi dan Jaringan Operasional .....	44
C. Struktur Organisasi.....	45
D. Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan.....	45
E. Produk dan Jasa Pelayanan .....	48
BAB IV ANALISIS DATA .....	50
A. Tahapan Analisis Data .....	50
B. Analisis Rasio Keuangan UKM.....	52
C. Analisis Tingkat Kesehatan UKM .....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka .....	73

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Indikator dan Aspek Keuangan Kelompok Non Infrastruktur.....	13
Tabel 4.1 Perhitungan ROE Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	52
Tabel 4.2 Perhitungan ROI Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	54
Tabel 4.3 Perhitungan <i>Cash Ratio</i> Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	56
Tabel 4.4 Perhitungan <i>Current Ratio</i> Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	58
Tabel 4.5 Perhitungan <i>Collection Periods</i> Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	59
Tabel 4.6 Perhitungan Perputaran Persediaan Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	61
Tabel 4.7 Perhitungan TATO Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	62
Tabel 4.8 Perhitungan TMS terhadap TA Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	63
Tabel 4.9 Perhitungan Bobot Masing-Masing Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.....	65

Tabel 4.10 Perhitungan Tingkat Kesehatan Sebelum dan Sesudah

Penerimaan Kredit Komersial..... 68

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Surat Keterangan Penelitian.....	74
B. Laporan Neraca dan Laba-Rugi	
1. Perusahaan ABC .....	75
2. Perusahaan CDE.....	77
3. Perusahaan EFG .....	79
4. Perusahaan GHI .....	81
5. Perusahaan IJK.....	83
6. Perusahaan KLM.....	85
7. Perusahaan MNO .....	87
8. Perusahaan OPQ.....	89
9. Perusahaan QRS.....	91
10. Perusahaan STU.....	93
C. Perhitungan Tingkat Kesehatan.....	95
D. Hasil Perhitungan T-Test	
1. <i>Return On Equity</i> (ROE).....	100
2. <i>Return On Investment</i> (ROI).....	101
3. <i>Cash Ratio</i> .....	102
4. <i>Current Ratio</i> .....	103
5. <i>Collection Periods</i> .....	104
6. Perputaran Persediaan.....	105
7. <i>Total Asset Turn Over</i> (TATO).....	106

8. Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva .....	107
9. Tingkat Kesehatan UKM .....	108
E. Struktur Organisasi PT. BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta .....	109
F. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 .....	110
G. Tabel T .....	137

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Seperti kita ketahui krisis ekonomi Indonesia yang bermula dari krisis moneter (gejolak nilai tukar) sekitar empat tahun yang lalu telah berdampak luas terhadap sendi-sendi perekonomian. Krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan menurunnya kegiatan sektor riil.

Pada masa krisis ini banyak pengusaha yang menutup kegiatan usahanya baik usaha besar maupun Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM ternyata memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dibanding usaha besar. Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak krisis ekonomi terhadap UKM menunjukkan bahwa hanya 4% UKM yang berhenti usahanya sementara 64% UKM tetap bertahan usahanya, dan 31% lainnya terpaksa mengurangi usahanya.<sup>1</sup>

Ketahanan tersebut disebabkan karena UKM memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Disamping itu UKM memiliki potensi pasar yang tinggi, mengingat harga produknya yang relatif rendah, sehingga terjangkau oleh kalangan pasar terbesar di Indonesia, yakni golongan ekonomi lemah. Ketahanan UKM tersebut juga terkait dengan fleksibilitas dan kurang tergantungnya UKM kepada kredit perbankan.

---

<sup>1</sup> Amriël Arief, "Permasalahan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Solusinya", Makalah pada Diskusi Panel Prospek Bisnis UKM di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, 10 Agustus, 2002, hal 3.

Diperkirakan baru sekitar 19% UKM yang telah mendapatkan layanan perbankan.

Sedikitnya UKM yang telah mendapatkan layanan perbankan terutama menyangkut kredit tidak hanya disebabkan oleh kesalahan bank. Berdasarkan laporan ADB *SME Development* dinyatakan bahwa terdapat 32% UKM tidak memerlukan kredit, 33% UKM butuh kredit tapi tidak mengajukan, 14% UKM perlu kredit dan sudah mengajukan namun belum menerima, dan 21% UKM menerima kredit dari bank. Penelitian ini dilakukan terhadap UKM di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.<sup>2</sup>

UKM yang termasuk dalam kategori tidak membutuhkan kredit mungkin belum menyadari akan pentingnya kredit. Tujuan kredit bagi debitur, antara lain: sebagai sarana untuk membuat usaha makin lancar dan *performance* (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya. Kredit akan meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan. Selain itu kredit akan memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia telah ditunjuk sebagai salah satu pihak yang menyediakan kredit komersial bagi kalangan UKM. Program ini telah dilaksanakan dengan baik terbukti dari laba yang diperoleh oleh BRI. Laba yang diperoleh semakin lama semakin meningkat. Laba itu diperoleh dari bunga hutang yang diberikan kepada UKM.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 9.

Mengingat pentingnya kredit baik bagi perbankan maupun kalangan usaha (UKM) maka perlu adanya sikap saling kerjasama antara masing-masing pihak. Untuk meningkatkan komitmen perbankan terhadap UKM, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) pada tanggal 22 April 2002 telah menandatangani MoU Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>3</sup> Dalam hal ini Pemerintah akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan menggali sumber-sumber pendanaan untuk disalurkan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- b. Mengkoordinasikan dalam mengupayakan dana untuk program pendampingan dan pelatihan bagi penduduk miskin penerima kredit UMKM.
- c. Mengkoordinasikan dalam mengupayakan penguatan Lembaga Penjamin Kredit untuk usaha mikro.
- d. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi terbitnya peraturan pemerintah/perundangan untuk memperlancar pelaksanaan pengembangan kredit UMKM.

Sementara itu dalam MoU tersebut BI bertanggung jawab untuk melaksanakan sejumlah hal sebagai berikut:

- a. Mendorong Bank Umum dan BPR untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM *business plan* masing-masing bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 9

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit UMKM dari Bank Umum dan BPR setiap tiga bulan.
- c. Menyediakan informasi sektor/sub sektor unggulan untuk pengembangan Usaha Kecil melalui Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK).
- d. Melakukan penelitian-penelitian, antara lain Penelitian Potensi Dasar Ekonomi Daerah/BLS (*Baseline Economic Survey*) dan penelitian komoditi yang layak dibiayai oleh bank untuk pengembangan usaha kecil.
- e. Memberikan pelatihan kepada staf Bank Umum dan BPR, khususnya di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- f. Menyesuaikan ketentuan Bank Umum dan BPR guna mendorong penyaluran kredit UMKM.
- g. Memperkuat infrastruktur kelembagaan perbankan dalam penyaluran kredit UMKM.

Diharapkan dengan adanya kerjasama antara kalangan perbankan dan usahawan krisis di Indonesia dapat teratasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan disepakati judul dari penelitian itu adalah **ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN UKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)**

## **B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

1. Apakah ada perbedaan tingkat kesehatan UKM antara sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kesehatan UKM antara sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi penulis

Penelitian ini dijadikan sebagai media untuk berpikir kritis dan melakukan analisa terhadap lingkungan di sekitar.

2. Bagi bank

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai kinerja UKM dan dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan kredit komersial kepada UKM.

3. Bagi UKM

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi UKM perlu tidaknya mengajukan kredit komersial kepada pihak bank.

4. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan umum mengenai bank, kredit, kinerja keuangan, dan UKM.

## E. HIPOTESIS PENELITIAN

1. Diduga ada perbedaan tingkat kesehatan antara sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial.

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian empiris untuk mengukur tingkat kesehatan UKM sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial.

### 1. Batasan Penelitian

- a. Periode yang dipilih dalam penelitian adalah sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial, maka periode yang diamati adalah data tahunan periode 1999 (periode sebelum penerimaan kredit) dan tahun 2001 (periode sesudah penerimaan kredit).
- b. Penilaian tingkat kesehatan hanya pada aspek keuangan saja sehingga aspek operasional dan administrasi diabaikan.

### 2. Variabel Penelitian

#### a. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

##### 1) Imbalan kepada Pemegang Saham/*Return On Equity* (ROE)

ROE adalah kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

## 2) Imbalan Investasi/*Return On Investment* (ROI)

ROI adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.

### b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya.

#### 1) Rasio Kas/*Cash Ratio*

*Cash Ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan.

#### 2) Rasio Lancar/*Current Ratio*

*Current Ratio* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

### c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran modalnya.

#### 1) *Collection Periods* (CP)

*Collection Periods* adalah periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang.

## 2) Perputaran Persediaan (PP)

Perputaran persediaan adalah kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari persediaan dan tendensi untuk adanya *overstock*.

## 3) Perputaran Total Aset/*Total Asset Turn Over* (TATO)

Perputaran total aset adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue*.

### d. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

#### 1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur.

### 3. Kebutuhan Data

#### a. Data Umum

Data umum merupakan data yang menggambarkan keadaan bank dan UKM yang tidak berpengaruh secara langsung dengan analisis penelitian yang diteliti, meliputi:

- 1) Sejarah berdiri dan perkembangan bank .
- 2) Lokasi dan jaringan operasional.

- 3) Struktur organisasi.
- 4) Tugas dan Tangung Jawab Karyawan
- 5) Produk dan jasa usaha bank.

b. Data Khusus

Data khusus merupakan data yang dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan analisis penelitian yang diteliti, meliputi:

- 1) Laporan Laba-Rugi UKM tahun 1999 dan tahun 2001.
- 2) Neraca UKM tahun 1999 dan tahun 2001.

4. Jenis Data

c. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

d. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang telah disediakan untuk melengkapi data primer.

5. Obyek Penelitian, Populasi, dan Sampel

a. Obyek Penelitian

Obyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah UKM yang bergerak dalam sektor perdagangan dan menerima kredit komersial dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.

b. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian.

### c. Sampel

Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling*, yaitu memilih sekelompok obyek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan penelitian. Tujuannya agar dapat diperoleh UKM yang homogen. Sampel dipilih dengan kriteria:

- 1) UKM yang bergerak dalam sektor perdagangan
- 2) UKM yang menerima kredit komersial pada tahun 2000

Penelitian kali ini hanya mengambil sepuluh UKM yang dijadikan sampel karena adanya keterbatasan yang dialami oleh penulis. Pihak bank memberikan kesepuluh UKM tersebut dengan catatan tidak mempublikasikan kepada umum sehingga nama-nama dari UKM tidak ditulis sebenarnya.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung yang dikerjakan secara sistematis dan bertujuan untuk memperoleh data yang jelas dan lengkap.

### b. Observasi (Donald R.Cooper, C.William Emory, 1997:357-358)

Observasi merupakan pengamatan terhadap aktivitas atau kondisi perilaku maupun non perilaku. Penelitian ini menggunakan observasi non perilaku dengan analisis catatan, yaitu menganalisis dari catatan sejarah/sekarang maupun catatan perusahaan publik/swasta,

seperti: analisis keuangan tahun berjalan dan analisis kondisi fisik, pemeriksaan persediaan barang, menganalisis laporan keuangan, dan kondisi perusahaan.

## 7. Alat Analisis Data

### a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang memberikan keterangan dan penjelasan-penjelasan tentang obyek yang akan dibahas berupa angka-angka untuk mengetahui hasil dari analisis rasio baik rasio rentabilitas, likuiditas, aktivitas, maupun solvabilitas dari pos neraca dan laporan laba-rugi.

Penulis berpedoman pada rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN karena tidak adanya pedoman khusus atau alat analisis data keuangan lain untuk mengukur tingkat kesehatan UKM. Adapun alat analisisnya, yaitu:

#### 1) *Return On Equity* (ROE)

$$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

#### 2) *Return On Investment* (ROI)

$$\frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

3) *Cash Ratio*/Rasio Kas

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

4) *Current Ratio*/Rasio Lancar

$$\frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

5) *Collection Periods*

$$\frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

## 6) Perputaran Persediaan

$$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

7) *Total Asset Turn Over (TATO)*/Perputaran Total Aset

$$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

## 8) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

$$\frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berdasarkan tingkat kesehatan yang ditetapkan melalui penilaian terhadap kinerja perusahaan meliputi tiga aspek penilaian,

yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis hanya membatasi pada aspek keuangan sebagai penilaian tingkat kesehatan perusahaan.

Sistem penilaian tingkat kesehatan perusahaan yang ditentukan dengan nilai bobot kinerja perusahaan per tahun dan nilai bobot perusahaan berdasarkan rasio rentabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas.

TABEL 1.1  
DAFTAR INDIKATOR DAN ASPEK KEUANGAN  
KELOMPOK NON INFRASTRUKTUR

Indikator	Bobot
1. <i>Return On Equity</i>	20
2. <i>Return On Investment</i>	15
3. Rasio Kas	5
4. Rasio Lancar	5
5. <i>Collection Periods</i>	5
6. Perputaran Persediaan	5
7. Perputaran Total Aset	5
8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	10
Total Bobot	70

Tingkat kesehatan perusahaan digolongkan menjadi:

1) SEHAT, yang terdiri dari:

AAA apabila total skor (TS)  $> 95$

AA apabila  $80 < TS \leq 95$

A apabila  $65 < TS \leq 80$

2) KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

BBB apabila  $50 < TS \leq 65$

BB apabila  $40 < TS \leq 50$

B apabila  $30 < TS \leq 40$

3) TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:

CCC apabila  $20 < TS \leq 30$

CC apabila  $10 < TS \leq 20$

C apabila  $TS \leq 10$

Penggolongan tingkat kesehatan tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu karena penulis hanya memperhatikan aspek keuangan saja (aspek keuangan mempunyai bobot 70%) sehingga pedoman penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat digolongkan menjadi:

1) SEHAT, yang terdiri dari:

AAA apabila total skor (TS)  $> 66,5$

AA apabila  $56 < TS \leq 66,5$

A apabila  $45,5 < TS \leq 56$

2) KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

BBB apabila  $35 < TS \leq 45,5$

BB apabila  $28 < TS \leq 35$

B apabila  $21 < TS \leq 28$

3) TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:

CCC apabila  $14 < TS \leq 21$

CC apabila  $7 < TS \leq 14$

C apabila  $TS \leq 7$

b. Analisis Kuantitatif

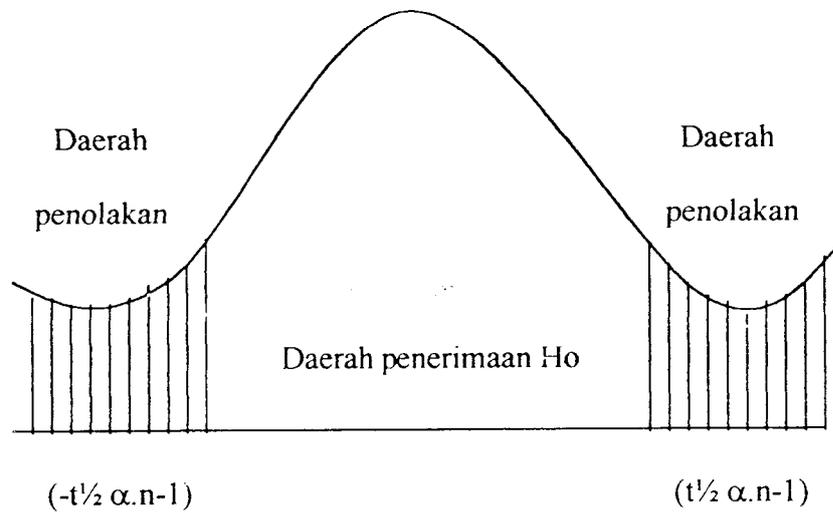
Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis data dengan menggunakan perhitungan-perhitungan angka (uji statistik). Penelitian ini menggunakan uji beda dua rata-rata untuk data berpasangan pada sampel kecil. Alat analisis ini dipilih karena memberikan penjelasan terhadap sampel yang dipilih mempunyai dua kelompok yang berbeda.

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesa:

1)  $H_0 : \mu$  sebelum penerimaan kredit =  $\mu$  setelah penerimaan kredit

2)  $H_a : \mu$  sebelum penerimaan kredit  $\neq$   $\mu$  setelah penerimaan kredit

3) Uji dua pihak (*two tailed test*)



4) Menentukan nilai t-hitung

$$t - \text{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left[ \frac{(n_1 - 1)SD_1^2 + (n_2 - 1)SD_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] \left[ \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}}$$

dimana:  $\bar{X}_1$  = rata - rata statistik untuk sampel pertama

$\bar{X}_2$  = rata - rata statistik untuk sampel kedua

$SD_1$  = standar deviasi untuk sampel pertama

$SD_2$  = standar deviasi untuk sampel kedua

$n_1$  = jumlah sampel pertama

$n_2$  = jumlah sampel kedua

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank

##### 1. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Beberapa definisi bank lain,<sup>4</sup> yaitu:

- a. “Bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral” (G.M. Verryn Stuart).
- b. “Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit” (Suyatno,1996:1).
- c. “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-

---

<sup>4</sup> Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 25.

perusahaan, dan lain-lain” (A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan).

## 2. Kegiatan Utama Bank

Kegiatan bank pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi enam kegiatan utama,<sup>5</sup>yaitu:

### a. Perkreditan

Kegiatan perkreditan merupakan rangkaian kegiatan utama bank umum. Hal ini didasarkan pada:

- 1) Perkreditan merupakan kegiatan yang terbesar dari perbankan.
- 2) Besarnya angka pos kredit yang diberikan dalam neraca merupakan angka yang terbesar dalam neraca bank.
- 3) Penghasilan terbesar bank diperoleh dari bunga, provisi, komisi, dan lain-lain yang diterima sebagai akibat dari pemberian kredit bank.
- 4) Resiko terbesar berasal dari kegiatan pemberian kredit.
- 5) Kegiatan perkreditan pada suatu bank umum merupakan kegiatan yang paling banyak memiliki struktur organisasi dan beragam sifatnya.

### b. *Marketing*

Kegiatan pemasaran suatu bank lebih banyak diarahkan pada penghimpunan dana dan berhubungan erat dengan strategi yang harus dilakukan oleh eksekutif bank. Strategi tersebut mencakup seluruh

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 33

aspek, seperti perencanaan, survei pasar, ramalan pasar, serta strategi pemasaran. Strategi pemasaran biasanya meliputi bauran pemasaran, yaitu:

- 1) Produk bank (*product*) yang akan dipasarkan
- 2) Harga (*price*) atau tingkat bunga yang akan ditawarkan
- 3) Tempat (*place*) dimana produk bank tersebut dipasarkan
- 4) Promosi (*promotion*) yang digunakan oleh bank dalam rangka memperkenalkan produknya ke konsumen (nasabah)

c. *Treasury*

Kegiatan *treasury* (pendanaan) lebih diutamakan kepada pengelolaan dana oleh para eksekutif bank. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kinerja yang optimal dalam memperoleh dana serta memaksimalkan alokasi dana kepada aktiva produktif.

d. *Operations*

Kegiatan *operations* adalah kegiatan unit-unit dalam bank yang bersifat membantu kegiatan-kegiatan unit utama bank lainnya.

e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan sumber daya manusia (*human resource*) dalam bank mencakup seluruh siklus di bidang sumber daya manusia.

f. Audit

Dalam bisnis perbankan terdapat tiga jenjang pengawasan /audit, yaitu:

### 1) Pengawasan Intern

Pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit di dalam bank yang dikenal dengan Satuan Kerja Unit Audit (SKAI). Unit ini diharuskan keberadaannya dalam bank berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### 2) Pengawasan Ekstern

Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang penunjukannya ditetapkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS) bank yang bersangkutan.

### 3) Pengawasan Bank Indonesia

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia baik secara berkala maupun secara mendadak berdasarkan kebutuhan tertentu menurut pertimbangan Bank Indonesia.

## 3. Perkreditan Bank

Dari beberapa pengertian di atas terdapat fungsi utama bank yaitu menyediakan kredit. Menurut UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Kredit dalam arti umum meliputi *commercial loan* dan *consumer's loan*.<sup>6</sup> *Commercial loan* merupakan kredit yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha, sehingga kredit ini mampu memperbaiki atau mengembangkan kinerja (*performance*) usaha debitur, bahkan jika mungkin dapat menciptakan *backward* dan *forward linkage* dan seterusnya dapat membawa efek berganda yang bersifat positif (*multiplier effect*). Penggunaan jenis kredit ini adalah untuk usaha-usaha produktif (kredit investasi dan kredit modal kerja), yang dapat mendukung sektor riil dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

*Consumer's loan* merupakan kredit yang diberikan bukan untuk kegiatan usaha yang produktif, tetapi untuk penggunaan yang bersifat konsumtif, namun mampu meningkatkan taraf hidup dan memperkuat daya beli si peminjam, yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil.

Sebagai salah satu unit usaha, proses kegiatan perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit itu sendiri, yang berupaya untuk<sup>7</sup> :

- a. Memelihara keamanannya, yaitu bank harus menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>6</sup> Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, PT Gramedia, Jakarta, 1999, hal 11.

<sup>7</sup> Ibid, hal 3

- b. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-sungguh dipakai oleh debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usaha (*performance*) dan terbukti sampai pada obyek kredit.
- c. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih kepada bank, debitur dan otorita moneter, sehingga mampu menimbulkan *backward* dan *forward linkage* kepada masyarakat luas.

Mekanisme dan strategi mengakses kredit usaha kecil<sup>8</sup>:

- a. Tahap pengajuan kredit

Prinsip dasar dari permohonan kredit adalah permohonan kredit harus tertulis dan realistis. Pemohon mengajukan kredit sesuai dengan ide, rencana kegunaan dan sumber angsuran yang dimiliki yang disampaikan kepada bank untuk dapat ditindaklanjuti.

- b. Tahap pengumpulan data (dokumen)

Sebagaimana ketentuan perbankan pada umumnya bahwa kredit harus diajukan secara tertulis yang menyangkut keabsahan usaha yang wajar seperti ada surat izin jika usaha itu resmi, memenuhi persyaratan perpajakan jika pengusaha tergolong pengusaha kena pajak (PKP), mampu memberikan informasi keuangan yang handal, terbuka untuk dimintai keterangan.

---

<sup>8</sup> Amril Arief, Permasalahan UKM dan Solusinya, Diskusi Panel Prospek Bisnis UKM di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta 10 Agustus 2002.

c. Tahap analisis dan negosiasi

Pada tahap ini bank akan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan dengan pendekatan teknis perbankan dan kehati-hatian. Dalam hal ini koordinasi antara nasabah dengan bank sangat mutlak diperlukan.

d. Tahap putusan kredit

Setelah terjadi kesepakatan sesuai hasil negosiasi maka bank akan memberikan keputusan akhir kepada nasabah yang berisi syarat-syarat pencairan kredit. Setelah semua persyaratan dipenuhi kredit siap dicairkan.

e. Tahap realisasi, pembayaran angsuran, dan pelunasan

Pada tahap ini biasanya terjadi kesalahan persepsi yang seringkali dialami oleh setiap nasabah, yakni bahwa cairnya suatu kredit adalah suatu keberhasilan upaya. Padahal justru sebaliknya, dimana sejak kredit ini dicairkan maka ini merupakan langkah awal dari suatu rencana, bagaimana manage rencana itu dengan baik, bagaimana mengembangkan bisnis sesuai dengan tujuan, bagaimana membina hubungan dengan bank yang baik, bagaimana kredit dapat diselesaikan secara lancar tanpa masalah.

f. Tahap pengembangan usaha berkelanjutan

Jika suatu kerjasama pembiayaan dapat dilalui dengan baik maka langkah untuk mengembangkan suatu usaha secara terus-menerus

dapat dilakukan karena pada dasarnya keberlangsungan bisnis tergantung dari kepercayaan dari mitra kerjanya secara keseluruhan.

#### 4. Pengawasan Kredit

Setelah bank memberi kredit, bank melakukan pengawasan terhadap UKM yang diberi kredit tersebut. Kredit yang diterima oleh UKM harus dialokasikan sesuai dengan rencana kegiatan. Pengawasan kredit adalah usaha untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan dari kesepakatan bank dan debitur dalam proses kegiatan perkreditan, yang mungkin menyebabkan kredit bermasalah dan merugikan bagi bank dan debitur.

Kegiatan pengawasan kredit ini mampu memberikan umpan balik secara dini atas kemungkinan deviasi yang terjadi akibat sebab-sebab intern (kelemahan/kekurangan/kelalaian di pihak bank) dan sebab-sebab ekstern (debitur, kondisi ekonomi, dan kebijaksanaan pemerintah).

Dengan adanya pengawasan kredit, bank punya kesempatan cukup untuk menyusun strategi identifikasi sebab-sebab di atas (intern/ekstern) dan menyusun program perbaikan sebelum terjadi kerugian total. Manajemen bank juga berpeluang melakukan antisipasi variabel penyebab deviasi baik intern maupun ekstern yang berasal dari hasil analisis SWOT sebelumnya.

Sebagai lanjutan kegiatan pengawasan, bank dapat segera menyusun strategi untuk memperbaiki kondisi kredit yang kurang baik

sehingga deviasi yang terjadi belum terakumulir. Bank juga dapat menentukan status kolektibilitas kredit agar strategi perbaikan dapat difokuskan pada penyebab utama deviasi dari setiap tingkat kolektibilitas.

Pendeteksian ketaatan dan kepatuhan kepada perjanjian dan ketentuan/peraturan yang berlaku dilakukan pada saat bank melakukan pengawasan kredit. Bila bank lalai melakukan pengawasan kredit efisiensi dan efektivitasnya akan hilang sehingga bank mengalami kerugian.

Prinsip pengawasan kredit, antara lain<sup>9</sup>:

a. Upaya pencegahan dan penjagaan dini

Upaya ini dilakukan terhadap *risk asset* bank dari indikasi-indikasi penyimpangan yang dapat merugikan bank dan gagalnya usaha debitur. Upaya ini termasuk dalam struktur pengendalian intern bank.

b. *Built in control*

Prinsip ini disebut juga pengawasan melekat yang menunjukkan pengawasan sehari-hari oleh pejabat terkait dalam perkreditan atas setiap tahap proses kegiatan perkreditan sesuai dengan sistem dan prosedur yang dipakai dalam kegiatan tersebut.

c. *Audit intern*

Pengawasan kredit ini merupakan bagian dari kontrol internal yang meliputi seluruh aspek perkreditan dan pelaksanaannya berkaitan dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Audit intern perkreditan

---

<sup>9</sup> Moh. Tjoekam, *op.cit*, hal 221

merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan kredit untuk lebih memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan KPB. Selain itu kredit telah memenuhi prinsip perkreditan yang sehat, juga telah mematuhi ketentuan intern bank dan ketentuan perbankan.

Tujuan pengawasan kredit, antara lain<sup>10</sup>:

- a. Sistem dan prosedur, peraturan/ketentuan dan undang-undang supaya dapat ditaati oleh pejabat bank dan debitur sebagai bagian dari pengguna jasa bank.
- b. Meminimalisir deviasi yang akan merugikan bank oleh para pejabat bank dan para debitur bank.
- c. Administrasi dan dokumentasi kredit terlaksana dengan baik sehingga dapat membantu tahapan proses kegiatan perkreditan menuju ke arah kredit portfolio yang sehat.
- d. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perkreditan bank sehingga perencanaan kredit terimplementasikan dengan baik.
- e. Dari hasil pengawasan berupa *feedback*, bank dapat melakukan pembinaan kredit dan nasabah.
- f. Kredit sebagai *risk asset* produktif yang sehat mampu memperbaiki *performance* bank dan menjamin kelanjutan hidup bank sendiri.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 225

## B. Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Myer dalam bukunya yang berjudul *Financial Statement Analysis*, laporan keuangan adalah:

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca (daftar posisi keuangan) dan daftar pendapatan (daftar rugi-laba). Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan)”.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

### 2. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan<sup>11</sup> adalah:

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.

Menurut Bernstein (1983:3):

“Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan”.

---

<sup>11</sup> Sofyan syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 190.

### 3. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein (1983) adalah:

#### a. *Screening*

Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger.

#### b. *Forecasting*

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

#### c. *Diagnosis*

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain.

#### d. *Evaluation*

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain.

### 4. Teknik Analisis Laporan Keuangan

Harahap (1996) mengemukakan teknik dalam analisis laporan keuangan sebagai berikut:

#### a. Metode Komparatif

Melakukan perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya yang relevan dan bermakna untuk mengetahui perbedaan, besaran, maupun hubungannya.

- 1) Intra perusahaan
  - 2) Inter perusahaan
  - 3) *Industrial Norm*
  - 4) *Budget*
- b. *Trend Analysis-Horizontal*

- 1) Indeks
- 2) *Numbers*

- c. *Common Size Financial Statement*

Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk persentasi. Persentasi itu biasa dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting misalnya, *asset* untuk neraca, penjualan untuk laba-rugi.

- d. *Metode Index Time Series*

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk megkonversikan angka-angka laporan keuangan.

- e. Analisis Rasio

- 1) Likuiditas
- 2) Profitabilitas/Rentabilitas
- 3) Solvabilitas
- 4) *Leverage*
- 5) Aktivitas
- 6) *Market Based Ratio*

- f. Teknik analisis lain, seperti:

- 1) Analisis sumber dan penggunaan dana
  - 2) Analisis *Break Even*
  - 3) *Dupont Analysis*
- g. *Analytical Review Transactional Analysis*
- h. Model Analisis
- 1) *Bond Rating*
  - 2) *Bankruptcy model*
  - 3) *Net Cash Flow Prediction Model*
  - 4) *Take Off Prediction Model*
  - 5) *Take Over Model*

## C. Analisis Rasio

### 1. Pengertian

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan memberi gambaran kepada analis tentang baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

### 2. Keunggulan Analisis Rasio<sup>12</sup>

- a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 298

- b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
  - c. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.
  - d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi.
  - e. Menstandarisir *size* perusahaan.
  - f. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik.
  - g. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.
3. Kelemahan Analisis Rasio<sup>13</sup>
- a. Rasio itu diambil dari data akuntansi yang memiliki sifat-sifat tersendiri yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran sendiri. Data akuntansi itu dimungkinkan mengandung data manipulasi atau kesalahan-kesalahan lain.  
  
Kalau analis ingin menganalisis dua perusahaan yang berbeda dan ingin membandingkannya maka analis harus melakukan:
    - 1) Analisis tentang prinsip akuntansi yang dianut.
    - 2) Melakukan penyesuaian (rekonsiliasi) atas hal-hal yang berbeda.
  - b. Dalam menilai suatu rasio baik atau buruk analis harus hati-hati.  
  
Misalnya *turn over* yang tinggi belum tentu baik.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 204

- c. Membandingkan dengan *industrial ratio* (yang belum ada di Indonesia) harus hati-hati karena banyak trik-trik yang digunakan manajemen untuk memperbaiki rasio.
- d. Laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan tenaga belinya.

#### 4. Jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara, antara lain:

##### a. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

##### 1) Imbalan Kepada Pemegang Saham/*Return On Equity* (ROE)

*Return On Equity* adalah kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

Rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi:

- Laba setelah pajak adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari:
  - Aktiva tetap

- Aktiva non produktif
  - Aktiva lain-lain
  - Saham penyertaan langsung
- Modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

## 2) Imbalan Investasi *Return On Investment* (ROI)

*Return On Investment* adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.

Rumus:

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{Capital Employed} \times 100\%$$

Definisi:

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari:
- Aktiva tetap
  - Aktiva lain-lain

- Aktiva non produktif
- Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah depresiasi, amortisasi, dan deplesi.
- *Capital employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

#### b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya.

##### 1) Rasio Kas/*Cash Ratio*

*Cash Ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan.

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi:

- Kas, bank, dan surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- *Current liabilities* adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

## 2) Rasio Lancar/*Current Ratio*

*Current Ratio* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

Rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi:

- *Current asset* adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku.
- *Current liabilities* adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

## c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia yang tercermin dalam perputaran modalnya.

### 1) *Collection Periods (CP)*

*Collection Periods* adalah periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang.

Rumus:

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi:

- Total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.
- Total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

## 2) Perputaran Persediaan (PP)

Perputaran persediaan adalah kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari persediaan dan tendensi untuk adanya *overstock*.

Rumus:

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi:

- Total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

### 3) Perputaran Total Aset/*Total Asset Turn Over* (TATO)

Perputaran total aset adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue*.

Rumus:

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi:

- Total pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap.
- *Capital employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

#### d. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

##### 1) Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur.

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Definisi:

- Total modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku di luar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total asset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

### BAB III

#### Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia

##### Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI)<sup>14</sup>

Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wirjaatmadja dan kawan-kawan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang pertama di Indonesia dengan nama *Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (bank bantuan dan simpanan milik pegawai pangreh praja berkebangsaan pribumi). Dikalangan masyarakat pada masa itu, *Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* dikenal sebagai bank “priyayi” karena selain milik dan didirikan oleh pegawai pangreh praja yang dikenal sebagai kaum priyayi juga karena tujuan utama pendirian bank ini adalah untuk membantu para priyayi bangsa Indonesia pribumi agar tidak jatuh dalam cengkeraman pada rentenir.

Bank priyayi di Purwokerto tersebut kemudian mengalami reorganisasi setelah Asisten Residen Banyumas E. Sieburgh diganti oleh W.P.D.De Wolf Van Westernode pada tahun 1897 dengan menerapkan sistem pengelolaan bank-bank petani di Jerman. Bank priyayi kemudian diganti namanya menjadi *Poerwokertosche Hulps, Spaar en Landbouw Cresietbank* (bank bantuan, simpanan dan kredit usaha tani Purwokerto) dan diproyeksikan menjadi sentral dari bank-bank koperasi di pedesaan sebagaimana bank-bank

---

<sup>14</sup> Humas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Seratus Tahun Bank Rakyat Indonesia, Cetakan Pertama, tahun 1995.

petani di Jerman. Dalam perkembangannya, yaitu pada tahun 1898, bank tersebut lebih dikenal sebagai *Volksbank* (bank rakyat) karena jangkauan operasinya tidak hanya terbatas pada priyayi tetapi juga meliputi rakyat banyak pada umumnya. Akan tetapi, *Volksbank* tersebut mengalami kesulitan, sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur tangan dalam perkreditan rakyat dan sejak tahun 1904 mendirikan *Dienst der Volkscredietwezen* (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membantu *Volksbank* secara materiil dan immateriil dengan tambahan modal, bimbingan, pembinaan, dan pengawasannya, sehingga perkreditan rakyat mulai tahun 1904 menjadi *Regering zorg* ( Tugas Pemerintah ).

Pemerintah Hindia Belanda semakin menyadari pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap bank rakyat yang telah ada. Berdasarkan surat keputusan Raja Belanda N0 118 tanggal 10 Juli 1912, *Staatblad* 1912 No 392, Pemerintah mendirikan *Centrale Kas Voor Net Volkscredietwezen* sebagai bank sentral bagi *Volksbank* dengan tujuan menyediakan dana usaha dan memberikan bantuan dalam pengelolaan (pembinaan dan pengawasan) kepada badan-badan kredit rakyat, serta menerima berbagai simpanan dana dari badan-badan kredit rakyat tersebut.

Sebagai akibat resesi dunia tahun 1929-1932 banyak *Volksbank* yang tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pada tanggal 19 Februari 1934 berdirilah *Algemeene Volkscredietbank* (AVB) dan dituangkan dalam *Staatblad* (Berita Negara) No 82 yang berstatus Badan Hukum Eropa. Modal pertama berasal dari hasil likuidasi *centrale kas*

ditambah dengan kekayaan bersih dari *Volksbank*. Dengan demikian AVB sebagai kelanjutan dari centrale kas merupakan integrasi dari *Volksbank*.

Pada masa pendudukan Jepang AVB diubah menjadi *Syomin Ginko* (Bank Rakyat) berdasarkan Undang-Undang No 39 tanggal 3 Oktober 1942 dengan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan anggaran dasar AVB terdahulu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, *Syomin Ginko* dirubah menjadi bank pemerintah yang pertama dengan nama "Bank Rakyat Indonesia" pada tanggal 23 Februari 1946 berdasarkan peraturan pemerintah No 1 tahun 1946 dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pada masa Agresi Belanda I tahun 1947, Belanda kembali menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dan adanya perjanjian Renville yang ternyata mengganggu kelancaran operasi BRI karena wilayah kerjanya semakin sempit. Jumlah kantor cabang yang semula 68 dipersempit menjadi 29 cabang yang langsung dipimpin oleh Kantor Besar di Yogyakarta. Gangguan ini dirasakan semakin berat ketika Belanda melakukan Agresi Militer II tahun 1948 dan pihak *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) mendirikan kembali kantor besar AVB. Pada tahun 1948 setelah ibukota RI Yogyakarta kembali diduduki Belanda maka kantor besar BRI dihapuskan oleh NICA dan direksi BRI dipenjarakan karena tidak mau bekerja sama dengan AVB. Sejak itu kegiatan BRI untuk sementara waktu terhenti

selama kurang lebih satu tahun sampai perjanjian Roem Royen tanggal 7 Mei 1949 disepakati.

Setelah perjanjian Roem Royen disepakati maka BRI kembali beroperasi di wilayah RI. Berdasarkan perjanjian itu terdapat pula Negara (Federal) Indonesia Serikat selain Negara bagian RI (Yogyakarta). Keadaan tersebut menimbulkan adanya “dua BRI”. Mulai 1 Januari 1950 secara de jure kantor pusat AVB di Jakarta menjadi Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia Serikat (BARRIS), sementara BRI Yogyakarta hanya merupakan Kantor Pusat BRI Negara Bagian.

Meskipun pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dihapus dan negara Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945, akan tetapi AVB baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan UU NO 12 tahun 1951. Selain itu Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 1946 diperbaharui dengan PP No 25 tahun 1951 tanggal 20 April 1951 yang menjadikan BRI sebagai Bank Menengah.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 maka dengan Perpu No 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 lembaran negara No 128/1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari beberapa bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani dan Nelayan, dan *Netherlandsche Handels maatschpij* (NHM). Belum sampai integrasi ketiga bank ini terlaksana, semua Bank

Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres No 8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 dijadikan satu dengan Bank Indonesia.

Pada waktu kebijaksanaan pemerintah mengarah kepada terciptanya Bank Tunggal, BKTN turut diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan berdasarkan Penpres No 9 tahun 1965 dan surat menteri bank sentral No 42 tahun 1965 dan nomor 47/1965. Penpres tersebut baru berjalan satu bulan, dikeluarkan Penpres No 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani, dan Nelayan (dulunya BKTN) diintegrasikan dengan nama BNI unit II.

Selanjutnya BNI Unit II dalam operasionalnya bekerja dengan nama BNI Unit II Bidang Rural (hasil peleburan BRI dan Bank Tani dan Nelayan) sedangkan NHM menggunakan nama BNI Unit II Bidang Eksim.

Pada akhir tahun 1968 berdasarkan UU NO 14 tahun 1967 tentang UU pokok perbankan dan UU No 13 tahun 1968 tentang UU Bank Sentral, mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. BNI Unit II Bidang Rural/Eksim dipindahkan menjadi bank-bank milik Negara dengan nama:

1. BRI yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Bidang Rural dengan UU No 21 tahun 1968.
2. Bank Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang Eksim dengan UU No 7 tahun 1968.

Sejalan dengan dikeluarkannya UU No 7 tahun 1992, BRI sebagaimana bank-bank pemerintah lainnya mulai menyesuaikan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan dengan PP No 21 tahun 1992 tentang penyesuaian badan hukum BRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya dengan akta pendirian No 133 tanggal 13 Juli 1992 yang telah disahkan dengan keputusan menteri kehakiman RI No C.2-6584.H.T.01.01.tahun 1992 tanggal 12 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 3A tahun 1992 nama BRI berubah menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BRI” yang disingkat menjadi PT. BRI (Persero) dan dalam praktek sehari-hari sering disebut juga “PT. BRI”.

Untuk mengenang sejarah BRI maka berdasarkan surat keputusan direksi BRI No Keputusan: S.67.DIY/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 ditentukan bahwa hari jadi BRI adalah tanggal 16 Desember 1985.

## **B. Lokasi dan Jaringan Operasional**

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro terletak di Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta. Gedung yang ditempati selain untuk kantor cabang juga dipakai sebagai kantor wilayah. Kantor cabang Cik Di Tiro ini melayani nasabah di Kotamadya Yogyakarta dan sekitarnya. Di Kodya Yogyakarta ada satu kantor cabang lagi yaitu PT. BRI Cabang Katamso yang terletak di Jalan Katamso Yogyakarta.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta menggunakan struktur matrik, yaitu struktur dimana komunikasi dan wewenang mengalir secara vertikal dalam unit fungsional dari atas ke bawah.

Bagan struktur organisasi PT. BRI Cabang Cik Di Tiro dapat dilihat dalam lampiran halaman 109.

### **D. Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan**

#### **1. Pemimpin Cabang**

Pemimpin cabang berperan sebagai manajer cabang yang mengkoordinasi kegiatan bisnis dan non bisnis kantor cabang sesuai rencana yang telah ditetapkan. Secara garis besar tugas-tugas pimpinan cabang adalah sebagai berikut:

- a. Di bidang bisnis, pimpinan cabang memutuskan dan memperpanjang kredit sesuai wewenangnya.
- b. Di bidang non bisnis, pimpinan cabang memantau sistem dan prosedur dan mengoptimalkan ketaatan pegawai.
- c. Mewakili direksi dalam urusan dengan nasabah dan pemerintah setempat di wilayah kerjanya.

#### **2. Manajer Operasional**

Manajer operasional memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir kegiatan operasional kantor cabang sesuai sistem dan prosedur dan bertanggung jawab kepada pemimpin cabang terhadap kelancaran operasional.
- b. Mengoptimalkan pelayanan.
- c. Memutuskan persetujuan biaya operasional sesuai kewenangan.
- d. Bertanggung jawab atas kebenaran kas secara fisik.
- e. Mengelola sumber daya manusia kantor cabang seefektif dan seefisien mungkin.

### 3. *Account Officer* (AO)

*Account officer* adalah bagian yang menangani masalah pelayanan kredit dan terbagi menjadi:

- a. AO kredit umum, bertugas mencari nasabah baru, bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kredit sampai memutuskan untuk pemberian kredit.
- b. AO program, menangani kredit pemerintah.
- c. AO tapsun, menangani kredit pegawai tetap dan pensiunan.
- d. Mantri Badan Kredit Desa (BKD), menangani kredit untuk desa.

### 4. Operator Kredit (OPK)

Bagian yang menangani administrasi perkreditan. Bagian ini dibagi menjadi:

- a. OPK umum, menangani administrasi kredit secara umum.
- b. OPK tapsun, menangani administrasi kredit pegawai tetap dan pensiunan.

## 5. Unit Pelayanan Nasabah

- a. Sebagai pintu gerbang dan pusat informasi untuk memulai hubungan dengan nasabah.
- b. Melayani segala macam pembukuan rekening koran.
- c. Melayani rehabilitasi rekening koran yang sudah di *blacklist* oleh Bank Indonesia.
- d. Memberikan informasi yang se jelasnya kepada nasabah yang belum mengerti atas produk perbankan.
- e. Menampung dan menyelesaikan keluhan nasabah.

## 6. Administrasi Dana Jasa

Bagian yang menangani administrasi/pelayanan terhadap dana-dana jasa, antara lain:

- a. Penerimaan setoran PLN.
- b. Penerimaan setoran pajak PBB.
- c. Penerimaan setoran listrik.
- d. Penerimaan setoran denda tilang.
- e. Penerimaan setoran SIM.
- f. Penerimaan setoran pajak lain (PPn, PPh, pegawai)

## 7. Teller

- a. Menerima dan membayar uang tunai dari nasabah atau dari pihak lain setelah melaksanakan dan memastikan kebenarannya (pemeriksaan tanda tangan, batas kewenangan membayar, dan tersedianya dana).

- b. Melayani dan menerima penyetoran dengan cek, BG, dan warkat pemindahbukuan.
- c. Menyerahkan kepada kasir kepala atau seksi kas dana yang melebihi batas simpanan yang diijinkan.
- d. Menyimpan dan memelihara dana tunai sesuai jumlah yang diijinkan.

8. Sekretariat

- a. Membantu tugas pimpinan.
- b. Memenuhi akan kebutuhan karyawan/wati.
- c. Menangani gaji karyawan.
- d. Memegang kas kecil perusahaan.
- e. Memperhatikan dan memeriksa absensi para karyawan.
- f. Menangani masalah keluar masuknya surat.
- g. Menginventarisir seluruh asset perusahaan.

**E. Produk dan Jasa Pelayanan**

- 1. Produk-produk PT. BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta
  - a. Giro rupiah.
  - b. Tabungan.
  - c. Deposito.
  - d. Kliring.
  - e. Transfer.
  - f. *Letter of Credit*.
  - g. Kredit.

- h. *Bank Guarantee.*
  - i. ATM BRI.
  - j. *Payment Collection.*
2. Jasa pelayanan pada PT. BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta
- a. Penerimaan setoran PLN.
  - b. Penerimaan setoran pajak PBB.
  - c. Penerimaan setoran listrik.
  - d. Penerimaan setoran denda tilang.
  - e. Penerimaan setoran SIM.
  - f. Penerimaan setoran pajak lain (PPn, PPh, pegawai).
  - g. *Money Changer.*
  - h. Daerah pemasaran.
  - i. Promosi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Tahapan Analisis Data**

Analisis data diperlukan untuk menjawab hipotesa atau untuk mengetahui adanya perbedaan pada tingkat kesehatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial dari bank.

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kuantitatif dan analisis secara kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang mengacu pada data-data numerik dengan perhitungan-perhitungan melalui metode tertentu. Analisis kualitatif adalah analisis yang menjelaskan data-data hasil analisis kuantitatif.

Untuk menganalisis adanya perbedaan tingkat kesehatan UKM sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial dari bank digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja keuangan masing-masing UKM dengan menggunakan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN, kemudian mencari rata-rata dari masing-masing rasio keuangan tersebut.
2. Menghitung tingkat kesehatan masing-masing UKM dengan menggunakan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002.

3. Untuk mengetahui adanya perbedaan pada tingkat kesehatan UKM tersebut digunakan uji beda dua rata-rata untuk data berpasangan pada sampel kecil (Uji T). Pengujian tersebut dengan menggunakan program komputer SPSS for Windows Versi 11.

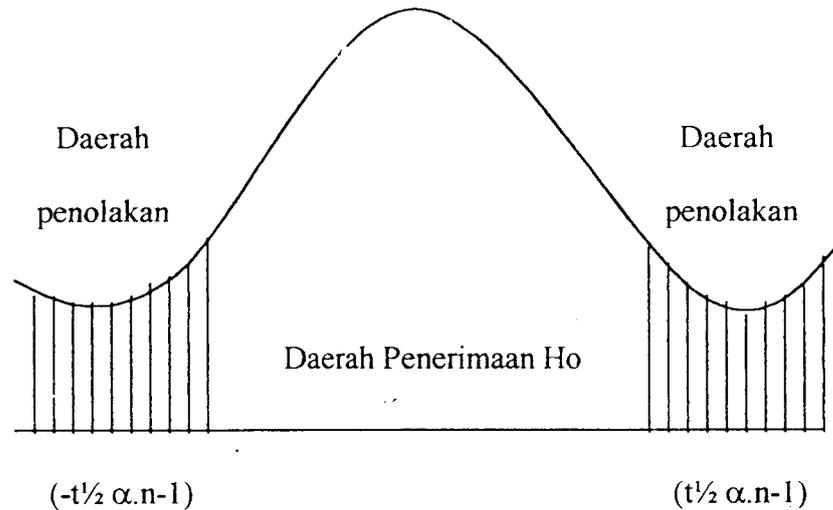
Langkah-langkah dalam pengujian uji T:

1.  $H_0: \mu$  sebelum penerimaan kredit =  $\mu$  sesudah penerimaan kredit

$H_a: \mu$  sebelum penerimaan kredit  $\neq$   $\mu$  sesudah penerimaan kredit

2. Uji dua pihak (*two tailed test*)

$H_0$  akan diterima apabila  $-2,262 < t\text{-hitung} < 2,262$



3. Taraf Signifikan ( $\alpha$ )=0,05

Adanya perbedaan tingkat kesehatan UKM sebelum dan sesudah penerimaan kredit apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan sebaliknya

apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan tingkat kesehatan UKM sebelum dan sesudah penerimaan kredit.

## B. Analisis Rasio Keuangan UKM

### 1. Imbalan Kepada Pemegang Saham/*Return on Equity* (ROE)

TABEL 4.1  
PERHITUNGAN ROE SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL

No	Nama Perusahaan	Rasio ROE	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	14,08%	20,37%
2	CDE	12,33%	25,44%
3	EFG	35,07%	33,25%
4	GHI	7,48%	20,62%
5	IJK	17,23%	10,24%
6	KLM	25,16%	26,34%
7	MNO	14,04%	20,94%
8	OPQ	11,42%	7,70%
9	QRS	20,66%	6,91%
10	STU	12,57%	11,40%
Jumlah		170,04%	183,21%
Rata-rata		17,00%	18,32%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan pada nilai ROE sesudah penerimaan kredit komersial. Sebelum penerimaan kredit rata-rata nilai ROE sebesar 17,00% (tahun 1999), artinya setiap Rp 1,00 modal yang disetor akan menghasilkan keuntungan Rp 0,17. Nilai ini meningkat sesudah penerimaan kredit

komersial menjadi 18,32% (tahun 2001), artinya setiap Rp 1,00 modal yang disetor akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0,18.

Kenaikan tersebut terjadi akibat adanya kenaikan yang dialami oleh lima UKM. Kenaikan dari kelima UKM ini lebih besar daripada penurunan yang dialami oleh lima UKM lainnya. Namun secara umum nilai rata-rata ROE baik sebelum penerimaan kredit komersial maupun sesudah penerimaan kredit komersial tergolong tinggi dan sudah mencapai nilai maksimal berdasarkan Keputusan Menteri BUMN. Nilai rata-rata ROE sudah melebihi nilai 15.

Kenaikan tersebut ternyata tidak berarti atau tidak terlalu signifikan terhadap tingkat ROE. Hasil dari SPSS (lampiran halaman 100) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,482 dengan probabilitas 0,641. Nilai ini berada pada  $-2,262 < -0,482 < 2,262$  dan probabilitasnya lebih besar dari 0,05 sehingga berada pada daerah penerimaan  $H_0$ , artinya tidak ada perbedaan nilai ROE sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial dari bank.

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan tingkat ROE sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial. Hal ini disebabkan karena kredit yang telah diberikan kepada UKM tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga laba (EAT) hanya mengalami kenaikan sedikit bahkan ada dua UKM yang mengalami penurunan EAT.

## 2. Imbalan Investasi/*Return on Investment* (ROI)

Keadaan tingkat ROI hampir sama dengan tingkat ROE. Tingkat ROI (tabel 4.2) secara rata-rata mengalami kenaikan sesudah penerimaan kredit komersial. Sebelum penerimaan kredit (tahun 1999) rata-rata tingkat ROI sebesar 33,13%, artinya setiap Rp 1,00 investasi yang dikeluarkan (total aktiva) akan menghasilkan laba (EBIT) sebesar Rp 0,33. Sesudah penerimaan kredit (tahun 2001) tingkat ROI meningkat menjadi 35,38%, artinya setiap Rp 1,00 investasi yang dikeluarkan (total aktiva) akan menghasilkan EBIT sebesar Rp 0,33.

TABEL 4.2  
PERHITUNGAN ROI SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL

No	Nama Perusahaan	ROI	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	51,80%	52,51%
2	CDE	43,58%	66,02%
3	EFG	55,79%	56,40%
4	GHI	49,95%	51,24%
5	IJK	23,23%	18,16%
6	KLM	28,04%	26,46%
7	MNO	27,32%	30,31%
8	OPQ	9,75%	15,66%
9	QRS	21,04%	11,36%
10	STU	20,81%	25,69%
Jumlah		331,31%	353,81%
Rata-rata		33,13%	35,38%

Kenaikan rata-rata tingkat ROI ini didukung oleh UKM yang mengalami kenaikan tingkat ROI. Ada tujuh UKM yang mengalami

kenaikan ROI sedangkan UKM lainnya mengalami penurunan. Secara umum tingkat rata-rata ROI ini jauh melebihi tingkat maksimum ROI yang ditetapkan Menteri BUMN. Tingkat rata-rata ROI UKM sebesar 33,13% dan 35,38% sedangkan batas tertinggi yang ditetapkan Menteri BUMN sebesar 18%.

Hasil perhitungan SPSS (lampiran halaman 101) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,840 dengan probabilitas 0,422. Kedua nilai ini terletak pada daerah penerimaan  $H_0$  baik berdasarkan perbandingan t-hitung dengan t-tabel maupun perbandingan probabilitasnya. Nilai t-hitung terletak pada  $-2,262 < -0,840 < 2,262$  dan probabilitas lebih besar dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan tingkat ROI sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit komersial kepada UKM tidak efektif dalam usaha untuk meningkatkan tingkat ROI. UKM belum mampu untuk mengelola tambahan dana dalam bentuk aktiva secara optimal agar dapat menghasilkan laba.

### 3. Rasio Kas/*Cash Ratio*

Hasil perhitungan *cash ratio* sebelum dan sesudah penerimaan kredit ternyata berbeda dengan dua rasio sebelumnya. Tingkat ROE dan ROI secara rata-rata mampu meningkat walaupun tidak begitu besar. Namun untuk *cash ratio* justru kebalikannya. Tingkat *cash ratio* secara rata-rata (tabel 4.3) mengalami penurunan cukup besar sesudah

penerimaan kredit. Sebelum penerimaan kredit (tahun 1999) tingkat *cash ratio* rata-rata sebesar 42,25% artinya setiap hutang sebesar Rp 1,00 akan dijamin dengan aktiva yang mudah dicairkan (kas, bank, dan surat berharga jangka pendek) sebesar Rp 0,42. Sesudah penerimaan kredit (tahun 2001) tingkat *cash ratio* menurun menjadi 31,54% sehingga hutang lancar sebesar Rp 1,00 hanya ditanggung dengan kas sebesar Rp 0,31.

TABEL 4.3  
PERHITUNGAN *CASH RATIO* SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL

No	Nama Perusahaan	<i>Cash Ratio</i>	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	17,20%	7,59%
2	CDE	3,02%	7,73%
3	EFG	76,09%	96,15%
4	GHI	7,82%	2,84%
5	IJK	4,50%	4,57%
6	KLM	213,68%	14,89%
7	MNO	5,74%	3,10%
8	OPQ	71,73%	4,37%
9	QRS	1,32%	0,83%
10	STU	21,38%	173,33%
Jumlah		422,48%	315,40%
Rata-rata		42,25%	31,54%

Menurut Keputusan Menteri BUMN rata-rata tingkat *cash ratio* ini sudah tinggi dan diberi skor maksimum. Namun tingkat *cash ratio* tersebut tidak bisa menggambarkan kondisi masing-masing UKM karena distribusi yang tidak merata. Ada UKM yang memiliki tingkat *cash ratio* sebesar 213,68% namun UKM lainnya hanya sebesar 1,32%.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS (lampiran halaman 102) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat *cash ratio* sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial karena nilainya termasuk dalam daerah penerimaan  $H_0$ . Nilai t-hitung sebesar 0,394 terletak pada  $-2,262 < 0,394 < 2,262$  dan probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,703.

Kesimpulan yang bisa didapat dari analisis di atas adalah dengan adanya pemberian kredit akan menyebabkan turunnya tingkat *cash ratio*. Hal ini dikarenakan UKM yang diteliti adalah UKM yang bergerak dalam bidang perdagangan sehingga dana yang didapat dari kredit diinvestasikan dalam bentuk barang atau untuk memperbanyak persediaan barang dagangan bukan disimpan dalam bentuk uang tunai atau simpanan/deposito.

#### 4. Rasio Lancar/*Current Ratio*

Pada tabel 4.4 secara rata-rata dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pada *current ratio* setelah penerimaan kredit. Sebelum penerimaan kredit (tahun 1999) besarnya *current ratio* adalah 558,81% artinya setiap hutang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 5,58. Sesudah penerimaan kredit (tahun 2001) tingkat *current ratio* meningkat menjadi 792,57% dimana setiap hutang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 7,92. Hasil ini telah memenuhi syarat umum *current ratio* minimum yang harus dicapai yaitu sebesar 200% atau 2:1.

TABEL 4.4  
 PERHITUNGAN *CURRENT RATIO* SEBELUM DAN SESUDAH  
 PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL

No	Nama Perusahaan	<i>Current Ratio</i>	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	249,11%	358,22%
2	CDE	276,20%	382,86%
3	EFG	902,76%	1596,22%
4	GHI	225,80%	223,62%
5	IJK	592,89%	623,41%
6	KLM	1720,19%	357,05%
7	MNO	296,22%	263,14%
8	OPQ	754,43%	147,39%
9	QRS	214,08%	263,20%
10	STU	356,44%	3710,61%
Jumlah		5588,12%	7925,72%
Rata-rata		558,81%	792,57%

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS (lampiran halaman 103) didapat nilai t-hitung sebesar -0,605 yang berarti  $-2,262 < -0,605 < 2,262$  atau berada pada daerah penerimaan  $H_0$  dengan probabilitas yang melebihi 0,05 yaitu sebesar 0,560. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat *current ratio* sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit tidak efektif dalam meningkatkan *current ratio* karena sebelum penerimaan kredit tingkat *current rasionya* sudah tinggi. UKM cenderung hanya mempertahankan tingkat *current ratio* di atas 200% dan menggunakan dana kredit untuk meningkatkan rasio lainnya

### 5. *Collection Periods* (CP)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat *collection periods* sudah termasuk baik yaitu di bawah 60 hari. Sebelum penerimaan kredit (tahun 1999) tingkat *collection periods* sebesar 21,11 artinya waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang selama 21 hari. Sesudah penerimaan kredit (tahun 2001) tingkat *collection periods* meningkat menjadi 22,59 sehingga waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang menjadi 23 hari.

TABEL 4.5  
PERHITUNGAN *COLLECTION PERIODS* SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL  
(HARI)

No	Nama Perusahaan	<i>Collection Periods</i>	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	9,92	10,00
2	CDE	5,56	4,72
3	EFG	6,66	8,13
4	GHI	26,04	20,84
5	IJK	11,62	21,15
6	KLM	5,60	15,03
7	MNO	59,40	36,20
8	OPQ	12,64	14,51
9	QRS	14,06	36,76
10	STU	59,55	58,56
Jumlah		211,05	225,90
Rata-rata		21,11	22,59

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS (lampiran halaman 104) menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak begitu signifikan. Nilai t-hitung menunjukkan angka -0,399 yang berarti  $-2,262 <$

-0,399 < -2,262 dan probabilitas sebesar 0,699, jauh lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan tingkat *collection periods* sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis di atas adalah UKM tergolong mampu dalam menagih piutangnya karena rata-rata tingkat *collection periods* di bawah 60 hari. Penambahan dana yang berasal dari kredit tidak berhubungan dengan hal ini sehingga tidak ada perubahan yang berarti.

#### 6. Perputaran Persediaan (PP)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata terjadi kenaikan tingkat perputaran persediaan sesudah penerimaan kredit komersial. Sebelum penerimaan kredit rata-rata tingkat perputaran persediaan selama 82 hari (tahun 1999), artinya waktu yang diperlukan untuk merubah persediaan menjadi uang tunai selama 82 hari. Tingkat perputaran persediaan meningkat sesudah penerimaan kredit komersial menjadi 140,55 hari (tahun 2001), artinya waktu yang diperlukan untuk merubah persediaan menjadi uang tunai selama 141 hari..

Kenaikan yang terjadi pada tingkat perputaran persediaan ini cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan data menggunakan SPSS (lampiran halaman 105). Nilai t-hitung sebesar -2,391 berarti  $-2,262 > -2,391$  dan probabilitas 0,040 lebih kecil dari 0,05 sehingga termasuk dalam daerah penolakan  $H_0$ , artinya ada perbedaan tingkat perputaran persediaan sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial.

TABEL 4.6  
 PERHITUNGAN PERPUTARAN PERSEDIAAN SEBELUM DAN SESUDAH  
 PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL  
 (HARI)

No	Nama Perusahaan	Perputaran Persediaan	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	84,35	88,74
2	CDE	122,17	120,44
3	EFG	13,60	39,92
4	GHI	82,01	130,11
5	IJK	200,68	348,40
6	KLM	82,53	114,63
7	MNO	64,81	169,77
8	OPQ	28,61	36,41
9	QRS	86,58	310,60
10	STU	57,85	46,49
Jumlah		823,19	1.405,51
Rata-rata		82,32	140,55

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kredit dari bank akan meningkatkan perputaran persediaan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang cukup besar pada persediaan barang dagangan tanpa diikuti dengan kenaikan pendapatan usaha.

#### 7. Perputaran Total Aset/*Total Asset Turn Over* (TATO)

Tingkat TATO sesudah penerimaan kredit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode sebelum penerimaan kredit. Berdasarkan tabel 4.7 rata-rata tingkat TATO sebelum penerimaan kredit (Tahun 1999) sebesar 196,61% artinya setiap Rp 1,00 aktiva akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,96. Sedangkan sesudah penerimaan kredit (tahun 2001) rata-rata tingkat TATO sebesar 166,77%

yang artinya setiap Rp 1,00 aktiva akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1,66.

TABEL 4.7  
PERHITUNGAN TATO SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL

No	Nama Perusahaan	TATO	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	144,42%	187,42%
2	CDE	150,34%	185,08%
3	EFG	457,94%	355,53%
4	GHI	217,42%	201,17%
5	IJK	112,42%	74,60%
6	KLM	243,69%	194,82%
7	MNO	131,82%	125,24%
8	OPQ	151,73%	127,93%
9	QRS	211,34%	71,22%
10	STU	145,02%	144,73%
Jumlah		1966,14%	1667,74%
Rata-rata		196,61%	166,77%

Walaupun penurunan tingkat TATO tersebut cukup besar namun belum begitu signifikan. Hasil perhitungan SPSS (lampiran halaman 106) menunjukkan nilai t-hitung dan probabilitasnya berada pada daerah pennerimaan  $H_0$  yang artinya tidak ada perbedaan tingkat TATO sebelum dan sesudah penerimaan kredit. Nilai t-hitung 0,992 terletak pada  $-2,262 < 0,992 < 2,262$  dan probabilitas 0,347 lebih besar dari 0,05.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan penambahan aktiva melalui kredit belum mampu dikelola dengan optimal oleh pelaku usaha sehingga terjadi penurunan tingkat TATO. Penurunan ini dapat terjadi karena

prosentase kenaikan aktiva lebih besar dari prosentase kenaikan pendapatan yang diperoleh.

#### 8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)

Tabel 4.8 menunjukkan adanya perubahan tingkat TMS terhadap TA walaupun sangat kecil. Sebelum penerimaan kredit (tahun 1999) besarnya TMS terhadap TA rata-rata adalah 73,01% artinya dalam menjalankan usahanya UKM menggunakan modal sendiri sebesar 73,01% dan menggunakan modal asing (kredit dari luar) sebesar 26,99%. Sesudah penerimaan kredit (tahun 2001) rasio ini menurun menjadi 71,68% artinya UKM mengurangi penggunaan modal sendirinya menjadi 71,68% dan menaikkan penggunaan modal asing menjadi 18,32%.

TABEL 4.8  
PERHITUNGAN TMS TERHADAP TA SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL

No	Nama Perusahaan	TMS terhadap TA	
		Sebelum	Sesudah
1	ABC	83,92%	85,54%
2	CDE	80,74%	83,08%
3	EFG	96,93%	96,88%
4	GHI	70,47%	62,32%
5	IJK	88,89%	87,79%
6	KLM	96,09%	79,77%
7	MNO	85,12%	73,94%
8	OPQ	42,92%	68,49%
9	QRS	12,43%	4,79%
10	STU	72,61%	74,17%
Jumlah		730,12%	716,77%
Rata-rata		73,01%	71,68%

Hasil perhitungan SPSS (lampiran halaman 107) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,371 yang berarti  $-2,262 < 0,371 < 2,262$  dan termasuk dalam daerah penerimaan  $H_0$ . Hal ini diperkuat dengan probabilitasnya yang melebihi 0,05 yaitu 0,719 artinya tidak ada perbedaan tingkat TMS terhadap TA sebelum dan sesudah penerimaan kredit.

Kesimpulan yang bisa didapat dari hasil analisis di atas adalah kredit yang didapat dari bank hanya dapat merubah sedikit rasio perbandingan antara penggunaan modal sendiri dengan modal asing. Hal ini disebabkan adanya dua komponen hutang yaitu hutang dari bank dan hutang dagangan. Hutang dagang UKM cukup besar sehingga pemberian kredit dari bank hanya dapat merubah sedikit rasio ini.

### C. Analisis Tingkat Kesehatan UKM

Tabel 4.9 menunjukkan bobot skor masing-masing rasio berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN.

#### 1. Imbalan Kepada Pemegang Saham/*Return on Equity* (ROE)

Secara umum UKM telah memiliki nilai ROE yang baik. Hal ini terlihat dari banyaknya UKM yang memiliki skor 20, hanya ada beberapa yang memiliki skor di bawah 16. UKM telah mampu mengelola modal sendirinya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

TABEL 4.9  
PERHITUNGAN BOBOT MASING-MASING RASIO KEUANGAN  
SEBELUM DAN SESUDAH PENERIMAAN  
KREDIT KOMERSIAL

Nama Perusahaan	Periode	SKOR								Total Skor
		ROE	ROI	Cash Ratio	Current Ratio	CP	PP	TATO	TMS thd TA	
ABC	Sebelum	18	15	3	5	5	4,5	5	7	62,5
	Sesudah	20	15	1	5	5	4,5	5	7	62,5
CDE	Sebelum	16	15	0	5	5	3,5	5	7	56,5
	Sesudah	20	15	1	5	5	3,5	5	7	61,5
EFG	Sebelum	20	15	5	5	5	5	5	6,5	66,5
	Sesudah	20	15	5	5	5	5	5	6,5	66,5
GHI	Sebelum	10	15	1	5	5	4,5	5	7,5	53
	Sesudah	20	15	0	5	5	3,5	5	8	61,5
IJK	Sebelum	20	15	0	5	5	2,4	4,5	7	58,9
	Sesudah	14	15	0	5	5	0	3	7	49
KLM	Sebelum	20	15	5	5	5	4,5	5	6,5	66
	Sesudah	20	15	2	5	5	4	5	7,5	63,5
MNO	Sebelum	18	15	1	5	5	4,5	5	7	60,5
	Sesudah	20	15	0	5	5	3	5	7,5	60,5
OPQ	Sebelum	16	7,5	5	5	5	5	5	9	57,5
	Sesudah	10	13,5	0	5	5	5	5	8	51,5
QRS	Sebelum	20	15	0	5	5	4,5	5	7,5	62
	Sesudah	10	9	0	5	5	0	3	7,5	39,5
STU	Sebelum	16	5	5	5	5	5	5	7	53
	Sesudah	16	5	5	5	5	5	5	6,5	52,5

## 2. Imbalan Investasi/*Return on Investment* (ROI)

UKM juga telah memiliki nilai ROI yang baik, dari 10 UKM hanya ada tiga UKM yang tidak mencapai skor maksimal (skor 15). Ini menandakan UKM telah mampu mengelola seluruh dana yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan.

## 3. Rasio Kas/*Cash Ratio*

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa UKM jarang menginvestasikan dananya dalam bentuk uang tunai bahkan tidak ada

satupun UKM yang menginvestasikan dananya dalam bentuk surat berharga sehingga nilai dari *cash ratio* ini cukup rendah. Banyak UKM yang mendapatkan skor nol.

Dana yang didapat dari kredit dimanfaatkan untuk sektor lain seperti penambahan persediaan, penambahan aktiva tetap, dan sebagainya. Untuk memenuhi likuiditasnya UKM menggunakan aktiva lancarnya termasuk persediaan barang dagangan.

#### 4. Rasio Lancar/*Current Ratio*

Rasio lancar menjadi salah satu rasio terbaik karena seluruh UKM baik sebelum maupun sesudah penerimaan kredit komersial memiliki skor tertinggi (skor 5). Ini menunjukkan bahwa UKM tergolong likuid dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas itu UKM mengandalkan persediaan barang dagangan.

#### 5. *Collection Periods (CP)*

Rasio ini juga menjadi rasio terbaik selain rasio lancar di atas. Seluruh UKM memiliki skor maksimal yang telah ditetapkan (skor 5). Ini menunjukkan bahwa UKM dalam melakukan penagihan piutang telah berjalan dengan baik sehingga terhindar dari kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

#### 6. Perputaran Persediaan (PP)

Secara umum UKM cukup baik dalam mengelola persediaannya, hanya ada dua UKM yang memiliki skor nol (0). UKM lainnya rata-rata memiliki skor tiga sampai 4,5. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran

persediaannya cukup cepat dan keuntungan yang didapat oleh UKM cukup banyak.

7. Perputaran Total Aset/*Total Asset Turn Over* (TATO)

Banyaknya UKM yang memiliki skor lima menunjukkan bahwa UKM telah mampu dalam mengelola aktivitya sehingga memperoleh pendapatan. Hanya ada dua UKM yang memiliki skor di bawah lima. Rasio ini cukup penting karena rasio ini menilai kemampuan UKM dalam mengelola aktiva dengan tujuan memperoleh pendapatan. Jika nilai rasio ini rendah maka dapat mempengaruhi rasio lainnya.

8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)

UKM dalam membiayai kegiatannya secara umum lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing. Rata-rata UKM memiliki skor 7,5 dan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 skor 7,5 itu berarti perusahaan menggunakan 70% modal sendiri untuk menjalankan usahanya.

9. Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan UKM secara umum tergolong sehat. Hanya ada satu UKM yang termasuk dalam kategori KURANG SEHAT (BBB) yaitu perusahaan QRS sesudah penerimaan kredit komersial. Berdasarkan tabel 4.10 sebelum penerimaan kredit rata-rata tingkat kesehatan UKM sebesar 59,44 dan termasuk dalam kategori SEHAT (AA). Sesudah penerimaan kredit tingkat kesehatan UKM menurun menjadi 56,85 namun masih

termasuk dalam kategori SEHAT (AA). Dari sepuluh UKM yang diteliti ada tiga UKM yang mengalami kenaikan tingkat kesehatan, tiga UKM tetap, dan empat UKM lainnya mengalami penurunan.

TABEL 4.10  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERIMAAN KREDIT KOMERSIAL

No	Nama Perusahaan	Tingkat Kesehatan			
		Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
		SKOR	KATEGORI	SKOR	KATEGORI
1	ABC	62,50	SEHAT (AA)	62,50	SEHAT (AA)
2	CDE	56,50	SEHAT (AA)	61,50	SEHAT (AA)
3	EFG	66,50	SEHAT (AA)	66,50	SEHAT (AA)
4	GHI	53,00	SEHAT (A)	61,50	SEHAT (AA)
5	IJK	58,90	SEHAT (AA)	49,00	SEHAT (A)
6	KLM	66,00	SEHAT (AA)	63,50	SEHAT (AA)
7	MNO	60,50	SEHAT (AA)	60,50	SEHAT (AA)
8	OPQ	57,50	SEHAT (AA)	51,50	SEHAT (A)
9	QRS	62,00	SEHAT (AA)	39,50	KURANG SEHAT (BBB)
10	STU	51,00	SEHAT (A)	52,50	SEHAT (A)
Jumlah		594,40		568,50	
Rata-rata		59,44		56,85	

Namun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar karena baik sebelum maupun sesudah penerimaan kredit tetap dalam kategori yang sama yaitu SEHAT (AA). Berdasarkan hasil SPSS (lampiran halaman 108) juga menunjukkan bahwa penurunan itu hanya sedikit. Nilai t-hitung sebesar 0,943 terletak pada  $-2,262 < 0,371 < 2,262$  dan probabilitasnya sebesar 0,370. Kedua nilai ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan

tingkat kesehatan sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial karena terletak pada daerah penerimaan  $H_0$ .

Kesimpulan yang dapat didapat dari hasil analisis di atas adalah pemberian kredit bank kepada UKM ternyata tidak efektif dalam usaha untuk menaikkan tingkat kesehatan bahkan cenderung untuk terjadi penurunan. Penurunan paling besar dialami oleh perusahaan IJK dan QRS. Masing-masing perusahaan mengalami penurunan sebesar 9,90 dan 22,50. Hal ini lebih banyak disebabkan adanya penurunan penjualan dan laba yang diperoleh (EAT). Penurunan ini cukup besar sehingga menyebabkan penurunan pada ROE, ROI, perputaran persediaan, dan TATO.

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Ringkasan hasil analisis rasio-rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-100/MBU/2002 untuk menguji apakah ada perbedaan pada tingkat kesehatan UKM sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial sebagai berikut:

Variabel (Rasio)	Sebelum	Sesudah	T-hitung	Probabilitas	Kesimpulan
ROE	17,00%	18,32%	-0,482	0,641	Tidak signifikan
ROI	33,13%	35,38%	0,840	0,422	Tidak signifikan
Cash Ratio	42,25%	31,54%	0,394	0,703	Tidak signifikan
Current Ratio	558,81%	792,57%	-0,605	0,560	Tidak signifikan
Collection Periods	21,11 hr	22,59 hr	-0,399	0,699	Tidak signifikan
Perputaran Persediaan	82,32 hr	140,55 hr	-2,391	0,040	Signifikan
TATO	196,61%	166,77%	0,992	0,347	Tidak signifikan
TMS thd TA	73,01%	71,68%	0,371	0,719	Tidak signifikan
Tingkat Kesehatan UKM	59,44	56,85	0,943	0,370	Tidak signifikan

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dan analisis sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hanya ada satu rasio keuangan saja yang mengalami perubahan yang signifikan setelah penerimaan kredit komersial dari bank. Rasio perputaran persediaan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan persediaan barang dagangan yang cukup tinggi namun di sisi lain pendapatan usaha hanya mengalami kenaikan sedikit saja.

2. Secara umum tingkat kesehatan UKM sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial termasuk sehat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kesehatan rata-rata UKM sebesar 59,44 (tahun 1999) dan 56,85 (tahun 2001) sehingga termasuk kategori SEHAT (AA).
3. **Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan UKM sebelum dan sesudah penerimaan kredit komersial dari bank sehingga hipotesis dari penelitian ini tidak terbukti.** Hal ini disebabkan adanya kesalahan pengelolaan kredit yang diterima oleh UKM. Kredit itu digunakan untuk meningkatkan persediaan barang dagangan namun tidak didukung dengan promosi sehingga penjualan tidak begitu meningkat dan terdapat banyak barang dagangan yang belum terjual. Di sisi lain persediaan barang dagangan ini membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga laba operasional yang diterima UKM menjadi sedikit.

## **B. Saran**

### 1. Bagi UKM

Dana yang diterima oleh UKM sebaiknya dapat dimanfaatkan secara optimal. Dana tersebut bisa digunakan untuk memperluas usaha atau juga untuk meningkatkan penjualan dengan cara melakukan pengembangan produk, penetapan harga jual yang bersaing, promosi, dan memperluas jaringan pemasaran.

Bagi UKM yang sudah mandiri sebaiknya tidak perlu mengambil kredit. Tingkat suku bunga kredit bank cukup tinggi, kalau tidak begitu

penting sebaiknya tidak mengambil kredit. Hal ini hanya akan mengurangi laba yang akan diperoleh.

## 2. Bagi Bank

Pihak bank sebaiknya melakukan pembinaan dan pengawasan setelah memberikan kredit kepada UKM. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet.

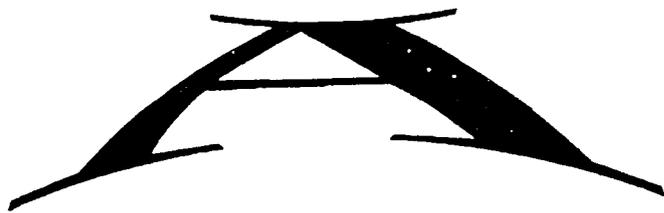
## 3. Bagi Pemerintah

UKM dalam masa krisis ini ternyata tidak semuanya memerlukan biaya untuk dapat meneruskan usahanya. Tidak sedikit juga UKM yang berhasil tanpa mendapatkan bantuan kredit dari bank. Untuk itu sebaiknya pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan sesungguhnya bagi UKM. Kebutuhan itu mungkin dapat berupa kebutuhan sumber daya manusia yang potensial melalui pelatihan-pelatihan baik operasional maupun manajemennya dan peraturan yang dapat menunjang keberhasilan UKM.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Basuki, *Peran Bank Dalam Pemberian Kredit Usaha Kecil* , Mikro, Edisi No 3 Tahun I, Maret 2002
- Amril Arief, *Permasalahan UKM dan Solusinya*, Diskusi Panel Prospek Bisnis UKM Di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta 10 Agustus 2002
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, edisi keempat, BPFE Yogyakarta, 1999
- Humas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), *Seratus Tahun BRI*, cetakan pertama, 1995
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Makalah Diskusi Panel, *Prospek Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Era Otonomi Daerah*, UPN Yogyakarta 10 Agustus 2002
- Moh Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia, Jakarta, 1999
- Munawir S, *Analisa Laporan Keuangan*, edisi keempat , Liberty, Yogyakarta, 2001
- Prosedur Penyusunan dan Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, edisi keempat, BPFE, Yogyakarta, 2001
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi keempat, Gramedia, Jakarta, 1999

LAMPIRAN





**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**  
**KANTOR CABANG**

Jalan Cik Ditiro No. 3 Telp. (0274) 520261, 520262, 520581  
Facsimile (0274) 512110, Telex 25121 BRI YKIA  
**Y O G Y A K A R T A**

Nomor : B<sup>5714</sup> KC-VII/UMU/02/2003

Yogyakarta, 07 Februari 2003

Lamp :

Hal : Surat keterangan telah  
Melaksanakan penelitian

Kepada  
Yth.Bp.Dekan Fak Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia  
di

YOGYAKARTA

Surat UII No.654/DEK/10/Bag.UMU/XI/2002

Menunjuk surat tersebut diatas, tentang ijin mencari data untuk bahan penyusunan skripsi., dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Tri Widodo..

NIM : 99311061.

Fakultas : Ekonomi Manajemen.

Telah melaksanakan penelitian pada kantor Cabang BRI Yogyakarta Cik Di Tiro dengan judul " Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan UKM sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit Komersial.." (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Ditiro Yogyakarta ). Yang dilaksanakan sejak tanggal 16 s/d tanggal 20 Desember 2002.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

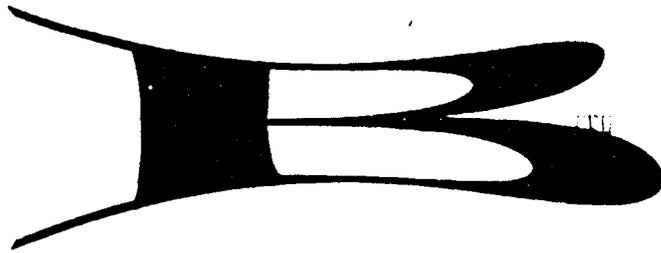
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)**  
**KANTOR CABANG**

  
Sugiyatno  
Pgs. Pemimpin Cabang.

Tindakan:

Arsip

LAMPIRAN







PERUSAHAAN ABC  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<u>Aktiva Lancar</u>		
- Uang Kas & Bank	10.750	6.250
- Piutang Dagang	15.250	29.220
- Persediaan Barang Dagangan	129.691	259.343
- Total Aktiva Lancar	155.691	294.813
<u>Aktiva Tetap</u>		
- Tanah	183.800	204.000
- Bangunan	145.200	145.200
- Mesin/Alat	5.000	0
- Inventaris	7.500	5.000
- Kendaraan	40.000	100.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	381.500	454.200
- Akumulasi Penyusutan	148.590	179.860
- Total Aktiva Tetap (Netto)	232.910	274.340
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>388.601</b>	<b>569.153</b>
<u>Hutang Jangka Pendek</u>		
- Pinjaman BRI	0	0
- Dagangan	62.500	82.300
- Total Hutang Jangka Pendek	62.500	82.300
- Total Hutang	62.500	82.300
<u>Modal</u>		
- Modal Sendiri	285.847	404.468
- Laba Tahun Berjalan	40.254	82.385
- Total Modal	326.101	486.853
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>388.601</b>	<b>569.153</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN ABC  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	561.220	1.066.700
Harga Pokok	420.915	800.016
Laba Kotor	140.305	266.684
B.Umum / Penjualan	59.847	119.400
Laba Operasional	80.458	147.284
B.Penyusutan Aktiva	16.510	28.260
B.Bunga Bank	0	0
B.Lain-lain	11.250	0
Laba Sebelum Pajak	52.698	119.024
Pajak dan lain-lain	12.444	36.639
<b>Laba Bersih</b>	<b>40.254</b>	<b>82.385</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN CDE  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	2.158	5.250
- Piutang Dagang	8.500	9.600
- Persediaan Barang Dagangan	186.901	245.224
- Total Aktiva Lancar	197.559	260.074
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	123.000	123.000
- Bangunan	114.700	114.700
- Mesin/Alat	8.000	8.000
- Inventaris	7.500	7.500
- Kendaraan	40.000	40.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	293.200	293.200
- Akumulasi Penyusutan	119.323	151.729
- Total Aktiva Tetap (Netto)	173.877	141.471
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>371.436</b>	<b>401.545</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	63.730
- Dagangan	71.528	4.200
- Total Hutang Jangka Pendek	71.528	67.930
- Total Hutang	71.528	67.930
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	266.991	265.953
- Laba Tahun Berjalan	32.917	67.662
- Total Modal	299.908	333.615
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>371.436</b>	<b>401.545</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN CDE  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	558.403	743.160
Harga Pokok	446.722	572.110
Laba Kotor	111.681	171.050
B.Umum / Penjualan	53.840	41.200
Laba Operasional	57.841	129.850
B.Penyusutan Aktiva	15.285	16.035
B.Bunga Bank	0	18.500
B.Provisi Bank	0	450
Laba Sebelum Pajak	42.556	94.865
Pajak dan lain-lain	9.639	27.203
<b>Laba Bersih</b>	<b>32.917</b>	<b>67.662</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN EFG  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	3.500	7.500
- Piutang Dagang	12.500	19.800
- Persediaan Barang Dagangan	25.527	97.205
- Total Aktiva Lancar	41.527	124.505
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	41.200	41.200
- Bangunan	90.000	90.000
- Mesin/Alat	5.000	5.000
- Inventaris	6.500	6.500
- Kendaraan	0	40.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	142.700	182.700
- Akumulasi Penyusutan	34.600	57.250
- Total Aktiva Tetap (Netto)	108.100	125.450
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>149.627</b>	<b>249.955</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	0
- Dagangan	4.600	7.800
- Total Hutang Jangka Pendek	4.600	7.800
- Total Hutang	4.600	7.800
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	107.375	181.728
- Laba Tahun Berjalan	37.652	60.427
- Total Modal	145.027	242.155
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>149.627</b>	<b>249.955</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN EFG  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	685.200	888.672
Harga Pokok	548.160	710.938
Laba Kotor	137.040	177.734
B. Umum / Penjualan	82.520	81.000
Laba Operasional	54.520	96.734
B. Penyusutan Aktiva	5.650	13.000
B. Bunga Bank	0	0
B. Provisi Bank	0	0
Laba Sebelum Pajak	48.870	83.734
Pajak dan lain-lain	11.218	23.307
<b>Laba Bersih</b>	<b>37.652</b>	<b>60.427</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN GHI  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	4.500	3.369
- Piutang Dagang	30.250	36.200
- Persediaan Barang Dagangan	95.264	225.950
- Total Aktiva Lancar	<b>130.014</b>	<b>265.519</b>
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	60.000	60.000
- Bangunan	40.000	40.000
- Mesin/Alat	25.000	25.000
- Inventaris	3.500	3.500
- Kendaraan	22.500	22.500
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	151.000	151.000
- Akumulasi Penyusutan	86.001	101.430
- Total Aktiva Tetap (Netto)	64.999	49.570
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>195.013</b>	<b>315.089</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	103.737
- Dagangan	57.578	15.000
- Total Hutang Jangka Pendek	57.578	118.737
- Total Hutang	57.578	118.737
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	127.873	162.788
- Laba Tahun Berjalan	9.562	33.564
- Total Modal	137.435	196.352
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>195.013</b>	<b>315.089</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN GHI  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	424.000	633.880
Harga Pokok	381.600	538.798
Laba Kotor	42.400	95.082
B.Umum / Penjualan	23.270	25.355
Laba Operasional	19.130	69.727
B.Penyusutan Aktiva	7.714	7.714
B.Bunga Bank	0	16.594
B.Provisi Bank	0	2.000
Laba Sebelum Pajak	11.416	43.419
Pajak dan lain-lain	1.854	9.855
<b>Laba Bersih</b>	<b>9.562</b>	<b>33.564</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN IJK  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	3.100	4.560
- Piutang Dagang	22.180	35.337
- Persediaan Barang Dagangan	383.110	581.975
- Total Aktiva Lancar	408.390	621.872
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	120.000	120.000
- Bangunan	50.000	50.000
- Mesin/Alat	0	0
- Inventaris	10.000	10.000
- Kendaraan	60.000	60.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	240.000	240.000
- Akumulasi Penyusutan	28.595	44.595
- Total Aktiva Tetap (Netto)	211.405	195.405
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>619.795</b>	<b>817.277</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	93.649
- Dagangan	68.881	6.105
- Total Hutang Jangka Pendek	68.881	99.754
- Total Hutang	68.881	99.754
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	469.932	650.868
- Laba Tahun Berjalan	80.982	66.655
- Total Modal	550.914	717.523
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>619.795</b>	<b>817.277</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN IJK  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	696.795	609.696
Harga Pokok	522.596	457.272
Laba Kotor	174.199	152.424
B.Umum / Penjualan	48.776	42.679
Laba Operasional	125.423	109.745
B.Penyusutan Aktiva	10.070	5.930
B.Bunga Bank	0	10.500
B.Provisi Bank	0	0
Laba Sebelum Pajak	115.353	93.315
Pajak dan lain-lain	34.371	26.660
<b>Laba Bersih</b>	<b>80.982</b>	<b>66.655</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN KLM  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	12.500	8.500
- Piutang Dagang	5.600	22.650
- Persediaan Barang Dagangan	82.531	172.723
- Total Aktiva Lancar	100.631	203.873
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	0	0
- Bangunan	35.000	75.000
- Mesin/Alat	7.500	7.500
- Inventaris	5.000	5.000
- Kendaraan	11.500	11.500
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	59.000	99.000
- Akumulasi Penyusutan	9.850	20.558
- Total Aktiva Tetap (Netto)	49.150	78.442
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>149.781</b>	<b>282.315</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	54.850
- Dagangan	5.850	2.250
- Total Hutang Jangka Pendek	5.850	57.100
- Total Hutang	5.850	57.100
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	115.000	178.263
- Laba Tahun Berjalan	28.931	46.952
- Total Modal	143.931	225.215
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>149.781</b>	<b>282.315</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN KLM  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	365.000	550.000
Harga Pokok	302.950	451.000
Laba Kotor	62.050	99.000
B.Umum / Penjualan	25.550	38.500
Laba Operasional	36.500	60.500
B.Penyusutan Aktiva	4.354	6.354
B.Bunga Bank	0	1.850
B.Provisi Bank	0	0
Laba Sebelum Pajak	32.146	52.296
Pajak dan lain-lain	3.215	5.344
<b>Laba Bersih</b>	<b>28.931</b>	<b>46.952</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN MNO  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	3.530	5.497
- Piutang Dagang	85.500	80.960
- Persediaan Barang Dagangan	93.294	379.685
- Total Aktiva Lancar	182.324	466.142
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	195.000	195.000
- Bangunan	50.000	50.000
- Mesin/Alat	0	0
- Inventaris	17.000	17.000
- Kendaraan	25.000	25.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	287.000	287.000
- Akumulasi Penyusutan	55.575	73.385
- Total Aktiva Tetap (Netto)	231.425	213.615
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>413.749</b>	<b>679.757</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	170.444
- Dagangan	61.550	6.705
- Total Hutang Jangka Pendek	61.550	177.149
- Total Hutang	61.550	177.149
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	308.840	415.582
- Laba Tahun Berjalan	43.359	87.026
- Total Modal	352.199	502.608
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>413.749</b>	<b>679.757</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN MNO  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	525.400	816.320
Harga Pokok	420.320	653.056
Laba Kotor	105.080	163.264
B.Umum / Penjualan	58.700	32.653
Laba Operasional	46.380	130.611
Pendapatan Non Operasional	20.000	35.000
B.Penyusutan Aktiva	8.905	8.905
B.Bunga Bank	0	17.375
B.Provisi Bank	0	1.875
B.Lain-lain	0	22.200
Laba Sebelum Pajak	57.475	115.256
Pajak dan lain-lain	14.116	28.230
<b>Laba Bersih</b>	<b>43.359</b>	<b>87.026</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN OPQ  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b><u>Aktiva Lancar</u></b>		
- Uang Kas & Bank	11.225	6.445
- Piutang Dagang	32.746	60.120
- Persediaan Barang Dagangan	74.098	150.871
- Total Aktiva Lancar	118.069	217.436
<b><u>Aktiva Tetap</u></b>		
- Tanah	315.000	315.000
- Bangunan	30.000	395.000
- Mesin/Alat	15.000	17.000
- Inventaris	5.500	8.000
- Kendaraan	65.000	135.500
- Lainnya	100.000	155.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	530.500	1.025.500
- Akumulasi Penyusutan	25.550	60.674
- Total Aktiva Tetap (Netto)	504.950	964.826
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>623.019</b>	<b>1.182.262</b>
<b><u>Hutang Jangka Pendek</u></b>		
- Pinjaman BRI	0	62.464
- Dagangan	15.650	85.059
- Total Hutang Jangka Pendek	15.650	147.523
- H. Jangka Panjang BRI	0	225.000
- Total Hutang	15.650	372.523
<b><u>Modal</u></b>		
- Modal Sendiri	239.958	751.823
- Laba Tahun Berjalan	27.411	57.916
- Total Modal	267.369	809.739
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>283.019</b>	<b>1.182.262</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN OPQ  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	945.300	1.512.460
Harga Pokok	756.240	1.164.610
Laba Kotor	189.060	347.850
B.Umum / Penjualan	143.795	189.060
Laba Operasional	45.265	158.790
B.Penyusutan Aktiva	10.050	31.560
B.Bunga Bank	0	44.628
B.Provisi Bank	0	2.750
Laba Sebelum Pajak	35.215	79.852
Pajak dan lain-lain	7.804	21.936
<b>Laba Bersih</b>	<b>27.411</b>	<b>57.916</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN QRS  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	5.300	3.950
- Piutang Dagang	119.600	131.859
- Persediaan Barang Dagangan	736.550	1.114.144
- Total Aktiva Lancar	861.450	1.249.953
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	400.000	400.000
- Bangunan	200.000	200.000
- Mesin/Alat	0	0
- Inventaris	10.000	10.000
- Kendaraan	35.000	35.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	645.000	645.000
- Akumulasi Penyusutan	37.250	56.583
- Total Aktiva Tetap (Netto)	607.750	588.417
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.838.370</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	411.922
- Dagangan	402.392	62.982
- Total Hutang Jangka Pendek	402.392	474.904
- Total Hutang	402.392	474.904
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	884.138	1.275.329
- Laba Tahun Berjalan	182.670	88.137
- Total Modal	1.066.808	1.363.466
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.838.370</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN QRS  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	3.105.000	1.309.275
Harga Pokok	2.577.150	1.086.698
Laba Kotor	527.850	222.577
B.Umum / Penjualan	241.550	65.464
Laba Operasional	286.300	157.113
B.Penyusutan Aktiva	14.500	4.833
B.Bunga Bank	0	25.915
B.Provisi Bank	0	0
Laba Sebelum Pajak	271.800	126.365
Pajak dan lain-lain	89.130	38.228
<b>Laba Bersih</b>	<b>182.670</b>	<b>88.137</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN STU  
LAPORAN NERACA  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Neraca	Tahun 1999	Tahun 2001
<b>Aktiva Lancar</b>		
- Uang Kas & Bank	9.750	6.500
- Piutang Dagang	77.500	73.800
- Persediaan Barang Dagangan	75.288	58.848
- Total Aktiva Lancar	<b>162.538</b>	<b>139.148</b>
<b>Aktiva Tetap</b>		
- Tanah	120.000	120.000
- Bangunan	20.000	20.000
- Mesin/Alat	35.000	60.000
- Inventaris	2.500	2.500
- Kendaraan	15.000	15.000
- Total Aktiva Tetap (Bruto)	192.500	217.500
- Akumulasi Penyusutan	27.500	38.810
- Total Aktiva Tetap (Netto)	165.000	178.690
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>327.538</b>	<b>317.838</b>
<b>Hutang Jangka Pendek</b>		
- Pinjaman BRI	0	0
- Dagangan	45.600	3.750
- Total Hutang Jangka Pendek	45.600	3.750
- Total Hutang	45.600	3.750
<b>Modal</b>		
- Modal Sendiri	250.450	281.938
- Laba Tahun Berjalan	31.488	32.150
- Total Modal	281.938	314.088
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>327.538</b>	<b>317.838</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

PERUSAHAAN STU  
LAPORAN LABA-RUGI  
Periode Des'99 dan Des'01  
(ribuan rupiah)

Pos Laba-Rugi	Tahun 1999	Tahun 2001
Penjualan	475.000	460.000
Harga Pokok	384.750	372.600
Laba Kotor	90.250	87.400
B.Umum / Penjualan	39.600	33.250
Laba Operasional	50.650	54.150
B.Penyusutan Aktiva	10.000	11.310
B.Bunga Bank	0	0
B.Provisi Bank	0	0
Laba Sebelum Pajak	40.650	42.840
Pajak dan lain-lain	9.162	10.690
<b>Laba Bersih</b>	<b>31.488</b>	<b>32.150</b>

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta

LAMPIRAN



**PERUSAHAAN ABC  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	14,08%	18	20,37%	20
ROI	51,80%	15	52,51%	15
Cash Ratio	17,20%	3	7,59%	1
Current Ratio	249,11%	5	358,22%	5
Collection Periods	9,92 hr	5	10 hr	5
Perputaran Persediaan	84,35 hr	4,5	88,74 hr	4,5
TATO	144,42%	5	187,42%	5
TMS thd TA	82,92%	7	85,54%	7
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>62,5</b>		<b>62,5</b>

**PERUSAHAAN CDE  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	12,33%	16	25,44%	20
ROI	43,58%	15	66,02%	15
Cash Ratio	3,02%	0	7,73%	1
Current Ratio	276,20%	5	382,86%	5
Collection Periods	5,56 hr	5	4,72 hr	5
Perputaran Persediaan	122,17 hr	3,5	120,44 hr	3,5
TATO	150,34%	5	185,08%	5
TMS thd TA	80,74%	7	83,08%	7
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>56,5</b>		<b>61,5</b>

**PERUSAHAAN EFG  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	35,07%	20	33,25%	20
ROI	55,79%	15	56,40%	15
<i>Cash Ratio</i>	76,09%	5	96,15%	5
<i>Current Ratio</i>	902,76%	5	1596,22%	5
<i>Collection Periods</i>	6,66 hr	5	8,13 hr	5
Perputaran Persediaan	13,60 hr	5	39,92 hr	5
TATO	457,94%	5	355,53%	5
TMS thd TA	96,93%	6,5	96,88%	6,5
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>66,5</b>		<b>66,5</b>

**PERUSAHAAN GHI  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	7,48%	10	20,62%	20
ROI	49,95%	15	51,24%	15
<i>Cash Ratio</i>	7,82%	1	2,84%	0
<i>Current Ratio</i>	225,80%	5	223,62%	5
<i>Collection Periods</i>	26,04 hr	5	20,84 hr	5
Perputaran Persediaan	82,01 hr	4,5	130,11 hr	3,5
TATO	217,42%	5	201,17%	5
TMS thd TA	70,47%	7,5	62,32%	8
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>53</b>		<b>61,5</b>

**PERUSAHAAN IJK  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	17,23%	20	10,24%	14
ROI	23,23%	15	18,16%	15
Cash Ratio	4,50%	0	4,57%	0
Current Ratio	592,89%	5	623,41%	5
Collection Periods	11,62 hr	5	21,15 hr	5
Perputaran Persediaan	200,68 hr	2,4	348,40 hr	0
TATO	112,42%	4,5	74,60%	3
TMS thd TA	88,89%	7	87,79%	7
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>58,9</b>		<b>49</b>

**PERUSAHAAN KLM  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	25,16%	20	26,34%	20
ROI	28,04%	15	26,46%	15
Cash Ratio	213,68%	5	14,89%	2
Current Ratio	1720,19%	5	357,05%	5
Collection Periods	5,60 hr	5	15,03 hr	5
Perputaran Persediaan	82,53 hr	4,5	114,63 hr	4
TATO	243,69%	5	194,82%	5
TMS thd TA	96,09%	6,5	79,77	7,5
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>66</b>		<b>63,5</b>

**PERUSAHAAN MNO  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	14,04%	18	20,94%	20
ROI	27,32%	15	30,31%	15
<i>Cash Ratio</i>	5,74%	1	3,10%	0
<i>Current Ratio</i>	296,22%	5	263,14%	5
<i>Collection Periods</i>	59,40 hr	5	36,20 hr	5
Perputaran Persediaan	64,81 hr	4,5	169,77 hr	3
TATO	131,82%	5	125,24%	5
TMS thd TA	85,12%	7	73,94%	7,5
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>60,5</b>		<b>60,5</b>

**PERUSAHAAN OPQ  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	11,42%	16	7,70%	10
ROI	9,75%	7,5	15,66%	13,5
<i>Cash Ratio</i>	71,73%	5	4,37%	0
<i>Current Ratio</i>	754,43%	5	147,39%	5
<i>Collection Periods</i>	12,64 hr	5	14,51 hr	5
Perputaran Persediaan	28,61 hr	5	36,41 hr	5
TATO	151,73%	5	127,93%	5
TMS thd TA	42,92%	9	68,49%	8
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>57,5</b>		<b>51,5</b>

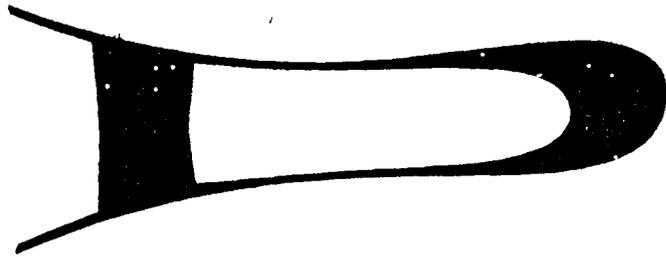
**PERUSAHAAN QRS  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	20,66%	20	6,91%	10
ROI	21,04%	15	11,36%	9
<i>Cash Ratio</i>	1,32%	0	0,83%	0
<i>Current Ratio</i>	214,08%	5	263,20%	5
<i>Collection Periods</i>	14,06 hr	5	36,76 hr	5
Perputaran Persediaan	86,58 hr	4,5	310,60 hr	0
TATO	211,34%	5	71,22%	3
TMS thd TA	72,61%	7,5	74,17%	7,5
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>62</b>		<b>39,5</b>

**PERUSAHAAN STU  
PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN**

Rasio Keuangan	Sebelum (1999)		Sesudah (2001)	
	Nilai Rasio	Bobot Rasio	Nilai Rasio	Bobot Rasio
ROE	12,57%	16	11,40%	16
ROI	20,81%	5	25,69%	5
<i>Cash Ratio</i>	21,38%	5	173,33%	5
<i>Current Ratio</i>	356,44%	5	3710,61%	5
<i>Collection Periods</i>	59,55 hr	5	58,56 hr	5
Perputaran Persediaan	57,85 hr	5	46,69 hr	5
TATO	145,02%	5	144,73%	5
TMS thd TA	86,08%	7	98,82%	6,5
<b>Tingkat Kesehatan</b>		<b>53</b>		<b>52,5</b>

LAMPIRAN



## Perhitungan T-Test

### Return On Equity (ROE)

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	17,0040	10	8,07635	2,55397
	Sesudah Penerimaan Kredit	18,3210	10	8,88458	2,80955

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	,484	,156

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit	
Paired Differences	Mean		-1,3170
	Std. Deviation		8,64225
	Std. Error Mean		2,73292
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-7,4993
		Upper	4,8653
t			-,482
df			9
Sig. (2-tailed)			,641

## Perhitungan T-Test

### Return On Investment (ROI)

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Sebelum Penerimaan Kredit	33,1310	10	15,83389	5,00712
Sesudah Penerimaan Kredit	35,3810	10	19,39977	6,13475

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	,904	,000

**Paired Samples Test**

		Pair 1
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit
Paired Differences	Mean	-2,2500
	Std. Deviation	8,46598
	Std. Error Mean	2,67718
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-8,3062
	Upper	3,8062
t		-,840
df		9
Sig. (2-tailed)		,422

## Perhitungan T-Test

### Cash Ratio

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	42,2480	10	66,35196	20,98233
	Sesudah Penerimaan Kredit	31,5400	10	57,48219	18,17746

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	,041	,910

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit	
Paired Differences	Mean	10,7080	
	Std. Deviation	85,98836	
	Std. Error Mean	27,19191	
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper	-50,8044 72,2204
	t		,394
df		9	
Sig. (2-tailed)		,703	

## Perhitungan T-Test

### Current Ratio

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	558,8120	10	473,98521	149,88728
	Sesudah Penerimaan Kredit	792,5720	10	1107,35500	350,17640

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	-,040	,912

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit	
Paired Differences	Mean		-233,7600
	Std. Deviation		1221,98739
	Std. Error Mean		386,42634
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-1107,9171
		Upper	640,3971
t			-,605
df			9
Sig. (2-tailed)			,560

## Perhitungan T-Test

### Collection Periods

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	21,1050	10	21,07117	6,66329
	Sesudah Penerimaan Kredit	22,5900	10	16,64790	5,26453

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	,831	,003

**Paired Samples Test**

		Pair 1
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit
Paired Differences	Mean	-1,4850
	Std. Deviation	11,76442
	Std. Error Mean	3,72024
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower Upper
		-9,9008 6,9308
t		-,399
df		9
Sig. (2-tailed)		,699

## Perhitungan T-Test

### Perputaran Persediaan

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	82,3190	10	51,78170	16,37481
	Sesudah Penerimaan Kredit	140,5510	10	108,86321	34,42557

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	,763	,010

**Paired Samples Test**

		Pair 1
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit
Paired Differences	Mean	-58,2320
	Std. Deviation	77,00074
	Std. Error Mean	24,34977
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-113,3150
	Upper	-3,1490
t		-2,391
df		9
Sig. (2-tailed)		,040

## Perhitungan T-Test

### Total Asset Turn Over (TATO)

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	187,4140	10	109,73829	34,70229
	Sesudah Penerimaan Kredit	166,2590	10	81,75710	25,85386

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	,790	,007

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit	
Paired Differences	Mean		21,1550
	Std. Deviation		67,45107
	Std. Error Mean		21,32990
	95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-27,0966
		Upper	69,4066
t			,992
df			9
Sig. (2-tailed)			,347

## Perhitungan T-Test

### Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	73,0120	10	26,38269	8,34294
	Sesudah penerimaan Kredit	71,6770	10	25,52873	8,07289

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah penerimaan Kredit	10	,905	,000

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah penerimaan Kredit	
Paired Differences	Mean		1,3350
	Std. Deviation		11,37187
	Std. Error Mean		3,59610
95% Confidence Interval of the Difference	Lower		-6,7999
	Upper		9,4699
t			,371
df			9
Sig. (2-tailed)			,719

## Perhitungan T-Test

### Tingkat Kesehatan UKM

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit	59,4400	10	5,11342	1,61701
	Sesudah Penerimaan Kredit	56,8500	10	8,40651	2,65837

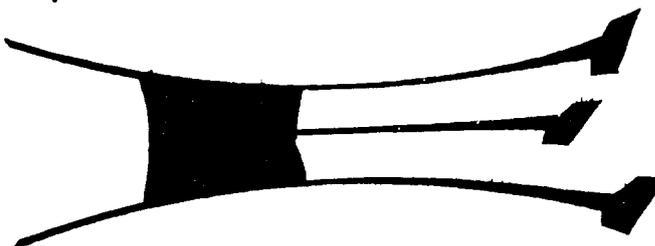
**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum Penerimaan Kredit & Sesudah Penerimaan Kredit	10	,249	,488

**Paired Samples Test**

		Pair 1	
		Sebelum Penerimaan Kredit - Sesudah Penerimaan Kredit	
Paired Differences	Mean		2,5900
	Std. Deviation		8,68542
	Std. Error Mean		2,74657
95% Confidence Interval of the Difference	Lower		-3,6232
	Upper		8,8032
t			,943
df			9
Sig. (2-tailed)			,370

# LAMPIRAN



STAF UNIT OPERASIONAL  
KANTOR BPT VOCYAKARTA CIK DI TIRO

PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN LEMBAR KERJA

MANAGER PEMASARAN

MANAGER OPERASIONAL

ASISTEN MANAGER  
PENUNJANG BISNIS

ASISTEN MANAGER  
OPERASIONAL

AO KOMERSIAL

SPV. ADM. KREDIT

ADK. KOMERSIAL

ADK. KONSUMER

AO KONSUMER

FUNDING OFFICER

SPV. PEL. INTENS

SERKETAPLAT SDMI

LOGISTIK

VERIFIKASI & ASUP

PELAPORAN, P & SUPPORT

PENGEMER DI

PRAMUBAKTI

SATPAM

SPV. PEL. I

CPN

SPV. PEL. II

ADM. DIS

CEPO. DEP. TAB. PU

PAMAK. NTK

SUB. PEM. DEvisa

ATM

DI

PETUGAS GIRO BI

TIRING

SPV. PEL. III

TELEP

TELEKUNJUNG

TELEKUNJUNG & VTP

TELEKUNJUNG

TELEKUNJUNG

PP. TELPO

PP. JANABADRA

PP. PLN

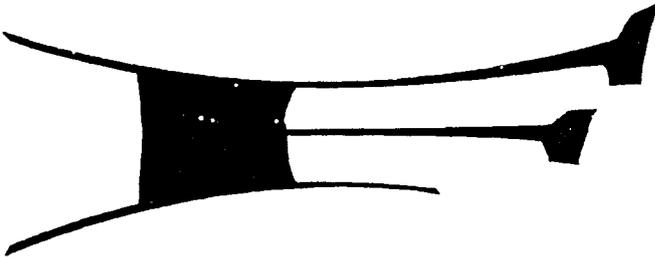
SPV. PEL. BELUNDA

TELEP

DI

- \*) Petugas Kuning cadangan
- \*\*) Petugas Khusus sector/branch Kas/Curo BI
- ) Petugas khusus di unit Terang Kontrak
- x) Di tempatkan oleh KP BRJ sebagai Staf
- o) Karir BRJ Cik Di Tiro

# LAMPIRAN

A decorative flourish consisting of a thick, black, curved horizontal bar with a central vertical stem and two horizontal lines extending from the stem, resembling a stylized 'E' or a calligraphic element.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : KEP-100/MBU/2002

TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
  - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
  - c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

BAB II  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. SEHAT, yang terdiri dari :
  - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
  - AA apabila  $80 < TS \leq 95$
  - A apabila  $65 < TS \leq 80$
- b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
  - BBB apabila  $50 < TS \leq 65$
  - BB apabila  $40 < TS \leq 50$
  - B apabila  $30 < TS \leq 40$
- c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
  - CCC apabila  $20 < TS \leq 30$
  - CC apabila  $10 < TS \leq 20$
  - C apabila  $TS \leq 10$

(2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

- a. Aspek Keuangan.
- b. Aspek Operasional.
- c. Aspek Administrasi.

(3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

(4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

BAB III  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

113  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
  - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
  - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
  - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV  
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.



Keputusan Menteri 114  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU-2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran I : 1/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

SALINAN

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
		1. PT Bhanda Ghara Rekza
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambrics Primisima
		Bidang Pertambangan dan Energi
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Leces
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran I : 2/4/16  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100-MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Utama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



Lampiran I : 3/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



Lampiran I : 4/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hwang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran No. : 1/10  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BUMN NON JASA KEUANGAN

ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
  - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
  - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.  
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

3. Metode Penilaian
  - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - Aktiva tetap
  - Aktiva Non Produktif
  - Aktiva Lain-lain
  - Saham Penyertaan Langsung



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 5/10  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :  
PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :  
PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



Lampiran II : 4/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II: 5/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



Lampiran II : 6/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
  - Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
  - Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



Lampiran II : //18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
  - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} : \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 8/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15
  
2. Indikator yang dinilai  
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"
  
3. Jumlah Indikator  
Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.
  
4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:  
  
Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :
  - Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
  - Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
  - Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
  - Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan  
Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :
  - Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
  - Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
  - Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
  - Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



Lampiran II : 10/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

5. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	25		35	

ASPEK ADMINISTRASI

- Total Bobot
  - BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
  - BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15
- Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya  
Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

- Metode Penilaian
  - Laporan Perhitungan Tahunan
    - Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 11/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

- Penentuan nilai

*Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit*

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

*Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP*

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



Lampiran II : 12/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.  
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
$< 60$ hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x.
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



Lampiran II : 13/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi :

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
  - Saldo awal
  - Pengembalian pinjaman
  - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
  - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999	Rp. 500
- Pengembalian pinjaman	Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan	Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK	Rp. 500

**Jumlah** **Rp.10.000**



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana =  $9.500/10.000 \times 100\%$   
Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus : 
$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:
  - Lancar 100 %
  - Kurang lancar 75 %
  - Ragu-ragu 25 %
  - Macet 0 %
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

Jumlah 3.000



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500 x 100 %	= 1.500
- Kurang lancar	500 x 75 %	= 375
- Ragu-ragu	800 x 25 %	= 225
- Macet	100 x 0 %	= 0

Jumlah rata-rata tertimbang 2.100

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah  $\frac{2.100}{3000} \times 100\% = 70\%$

3000

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
  - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
  - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



Lampiran II: 16/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100-MBU-2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pelayanan kepada Pelanggan/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perbaikan kualitas sarana &amp; prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan.</li> <li>✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service)</li> <li>✓ Perbaikan mutu produk.</li> <li>✓ Pengembangan jalur distribusi.</li> <li>✓ Pelayanan gangguan/troubles.</li> <li>✓ Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan.</li> <li>✓ Kecepatan pelayanan.</li> <li>✓ Guidance yang jelas bagi pelanggan.</li> <li>✓ Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa.</li> </ul>	<p>Pelabuhan</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>PLN</p> <p>Jalan Tol</p> <p>Garuda/MNA Bandara</p>	<p>Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb</p> <p>Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.</p> <p>Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.</p> <p>Kualitas jalan, indikator traffic sign.</p> <p>On time performance.</p> <p>Kebersihan terminal Bandara.</p>
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle.</li> <li>✓ Peningkatan rendemen.</li> <li>✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi.</li> <li>✓ Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya.</li> <li>✓ Peningkatan nilai men-hour.</li> <li>✓ Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi).</li> </ul>	<p>Perkebunan</p> <p>Kereta Api/pelayaran /penerbangan</p> <p>PLN</p> <p>Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)</p> <p>Konsultan</p> <p>Pertambangan</p>	<p>Rendemen, produksi per hektar, dsb.</p> <p>Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.</p> <p>Susut teknis, susut distribusi, dsb.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O &amp; P) Men-hour terjual, dsb.</p> <p>Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.</p>



Lampiran II: 17/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.</li> <li>✓ Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang.</li> <li>✓ Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum.</li> <li>✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan.</li> <li>✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.</li> </ul>	<p>Perkebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas demmaga, pengerukan alur /kolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p>
Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.</li> <li>✓ Penciptaan produk-produk baru</li> <li>✓ Peningkatan penguasaan teknologi.</li> </ul>	<p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>	<p>Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>
Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mutu diklat.</li> <li>✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	<p>Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan.</p> <p>Kaderisasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan</p> <p>Kepedulian manajemen terhadap R &amp; D.</p>
Research & Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan metode baru yang prospektif.</li> <li>✓ Hasil riset yang bermanfaat.</li> <li>✓ Perhatian perusahaan terhadap R &amp; D.</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pencapaian sasaran.</li> <li>✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran.</li> <li>✓ Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan.</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.



Lampiran II: 18/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
B. Kepedulian terhadap lingkungan.	✓ Kebersihan lingkungan. ✓ Pelaksanaan AMDAL. ✓ Reklamasi. ✓ Estate regulation.	Berlaku umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttt

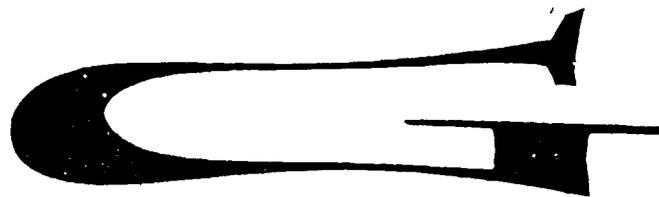
Victor Hutapea  
NIP 060051008

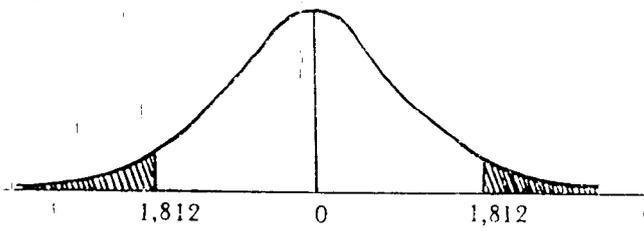
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttt

LAKSAMANA SUKARDI

LAMPIRAN





Bagi d.f. = 10 derajat bebas

$$P[t > 1,812] = 0,05$$

$$P[t < -1,812] = 0,05$$

d.f. \ $\alpha$	,25	,20	,15	,10	,05	,025	,01	,005	,0005
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,619
2	,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,598
3	,765	,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,941
4	,741	,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	,727	,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,859
6	,718	,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	,711	,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,405
8	,706	,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	,703	,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	,700	,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	,697	,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	,695	,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	,694	,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	,692	,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	,691	,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	,690	,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	,689	,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	,688	,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
19	,688	,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	,687	,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850
21	,686	,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
22	,686	,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792
23	,685	,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,767
24	,685	,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,397	3,745
25	,684	,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,752
26	,684	,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707
27	,684	,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,690
28	,683	,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674
29	,683	,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659
30	,683	,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646
40	,681	,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551
60	,679	,843	1,046	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460
120	,677	,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
$\infty$	,674	,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291

Sumber: Fisher and Yates: Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Table III Izin Penerbit: Oliver and Boyd, Ltd, Edinburgh, England.